

Laporan Kinerja

**Perwakilan BPKP Prov. Gorontalo
2023**



Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Perwakilan Provinsi Gorontalo

Nomor : OT.04/LKIN-02/PW31/1/2024
Tanggal : 5 Januari 2024

KATA PENGANTAR

Tahun 2023 merupakan tahun awal kebangkitan kehidupan yang normal setelah bergelut dengan pandemi Covid-19. Program penanganan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap Covid-19 termasuk upaya dalam memulihkan ekonomi nasional di berbagai program terus dilakukan oleh



Pemerintah Gorontalo, dalam rangka menciptakan efek eksponensial untuk melejitkan kebangkitan perekonomian masyarakat Gorontalo yang terpuruk beberapa waktu ini.

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) hadir dalam melakukan pengawasan terhadap penanganan seluruh program dan kegiatan dalam rangka membangkitkan perekonomian masyarakat tersebut. Tujuannya adalah agar *output terdelivered* kepada masyarakat secara akuntabel melalui kegiatan yang bersifat *assurance* maupun *consulting*, antara lain berupa pembinaan penyelenggaraan SPIP, manajemen risiko pada Instansi vertikal, pemerintah daerah dan badan usaha, serta mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Pembangunan Nasional dengan melalui audit serta evaluasi.

Pengawasan serta target pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo merupakan bentuk strategi pada tahun 2023 yang terbagi menjadi 7 (tujuh) sasaran kegiatan yaitu 1) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah, 2) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional, 3) Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Telola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP, 4) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha,

5) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi dan 6) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU, dan 7) Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja.

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan strategi, maka secara periodik Perwakilan BPKP menyusun Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Rencana Strategis 2020 – 2024 serta Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2023. Hal ini juga menjadi media pertanggungjawaban atas capaian kinerja dari sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja.

Laporan ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja tahun 2023, analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Gorontalo, 5 Januari 2024

Kepala Perwakilan,



Heru Tarsila

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Perpres Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, memberikan ketegasan bahwa peran BPKP adalah sebagai auditor Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada seluruh Instansi Pemerintah. BPKP dalam menyongsong tugas baru tersebut tentunya harus membenahi diri, mereposisi dan revitalisasi seluruh sumber daya yang dimiliki, yang diawali dengan merumuskan visi, misi, dan strategi yang baru dan diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang relevan untuk pencapaian tujuan pemerintah.

Dengan paradigma baru ini, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo berupaya untuk memberikan perbaikan dan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan membantu pemerintah daerah di wilayah Provinsi Gorontalo untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, melalui pemberian jasa *assurance* dan *consulting* tanpa meninggalkan aspek akuntabilitas.

Salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan SPIP adalah dengan menyusun Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Gorontalo. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan setiap tahun kepada Pimpinan serta capaian kinerja yang dapat dicapai disertai evaluasi dan analisis yang *proper*, sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2023, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja BPKP dalam mencapai sasaran kegiatan tahun 2023, juga mencerminkan sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) telah diimplementasikan, serta membuktikan bahwa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh pelaksanaan pada komponen AKIP, yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.

Sampai dengan 31 Desember 2023, capaian kinerja sasaran kegiatan beserta sumber daya pendukung yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebesar 148,45%.
2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebanyak 31 (tiga puluh satu) indikator kegiatan yang sebagian besar tercapai dan/atau lebih dari 100,00%.
3. Capaian sasaran kegiatan/*output* yang ditargetkan adalah 443 laporan pengawasan yang terdiri dari 125 laporan dari bidang IPP, 149 laporan dari bidang APD, 45 laporan dari bidang AN, 78 laporan dari bidang Investigasi, dan 46 laporan dari bidang P3A. Realisasi laporan yang terbit adalah sebanyak 445 laporan pengawasan, sehingga capaiannya sebesar 100,45%;
4. Penyerapan anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp18.713.054.698,00 atau terserap 99,74% dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp18.761.707.000,00;
5. Realisasi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 21.986 Orang Hari (OH) atau mencapai 132,77% dari potensi Orang Hari (OH) sebanyak 16.560 OH.

Daftar

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Perwakilan	1
B. Struktur Organisasi Unit Kerja.....	4
C. Aspek Strategis Organisasi.....	8
D. Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	14
A. Rencana Strategis 2020 – 2024	14
1. Pernyataan Visi	14
2. Pernyataan Misi	16
3. Kegiatan dan Sasaran Strategis	16
4. Indikator Kinerja Utama	17
5. Sasaran Program	20
6. Program dan Kegiatan	23
B. Perjanjian Kinerja 2023	27
1. Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2020.....	24
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	31
1. Ringkasan Kinerja	31
2. Uraian Kinerja	35
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	72
C. ANALISIS EFISIENSI	74
D. KINERJA LAINNYA	77
BAB IV PENUTUP	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	4
Gambar 1.2 Sistematisa Penyajian Laporan Kinerja	13
Gambar 2.1 Penyusunan Target Output Perwakilan	26
Grafik 3.1 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi.....	38
Grafik 3.2 Target dan Realisasi Indikator Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	39
Grafik 3.3 Capaian Indikator Kinerja Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah.....	42
Grafik 3.4 Target dan Realisasi Indikator Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan.....	46
Grafik 3.5 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi tahun 2020 s.d. 2024	47
Grafik 3.6 Target dan Realisasi Indikator Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti	49
Grafik 3.7 Target dan Realisasi Indikator Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat Tahun 2020 s.d. 2024	51
Grafik 3.8 Target dan Realisasi Indikator Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat Tahun 2020 s.d. 2024	52
Grafik 3.9 Target dan Realisasi Indikator Jumlah BUMDes Mampu Menyusun Laporan Tahun 2020 s.d. 2024	54
Grafik 3.10 Target dan Realisasi Indikator Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa Tahun 2020 s.d. 2024.....	55

Grafik 3.11 Target dan Realisasi Indikator Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	62
Grafik 3.12 Target dan Realisasi Indikator Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	63
Grafik 3.13 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Pemerintah Daerah dengan Maturitas SPIP \geq Level 3.....	64
Grafik 3.14 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3 Tahun 2020 s.d. 2024	65
Grafik 3.15 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3 Tahun 2020 s.d. 2024	65
Grafik 3.16 Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah Tahun 2020 s.d. 2024	66
Grafik 3.17 Jumlah Desa yang Pengelolaannya Akuntabel Tahun 2020 s.d. 2024.....	67
Grafik 3.18 Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara Memadai Tahun 2020 s.d. 2024.....	68

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Tabel SDM Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo berdasarkan Pangkat Golongan	7
Tabel 1.2 Tabel SDM Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo berdasarkan Struktur Jabatan.....	8
Tabel 1.3 Tabel SDM berdasarkan Komposisi Auditor	8
Tabel 1.4 Tabel SDM berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	9
Tabel 1.5 Tabel SDM berdasarkan Usia	9
Tabel 2.1 Target Kinerja Sasaran Program Renstra 2020-2024 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2023	20
Tabel 2.2 Tabel Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output).....	24
Tabel 2.3 Tabel Target Output per Bidang	26
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	29
Tabel 3.1 Ringkasan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2023.....	31
Tabel 3.2 Risiko untuk setiap sasaran kegiatan pada tahun 2023.....	35
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Tahun 2023	36
Tabel 3.4 Rincian Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi Tahun 2023.....	37
Tabel 3.5 Rincian Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah yang Terealisasi Tahun 2023.....	39
Tabel 3.6 Potensi Penyelamatan Keuangan negara Tahun 2023	41
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Nasional Tahun 2023	44

Tabel 3.8 Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi.....	47
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintah pada K/L/D/BU yang Menjadi Tanggung Jawab Perwakilan BPKP Tahun 2023.....	48
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha Tahun 2023.....	50
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Meningkatnya Pengawasan Pembangunan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2023.....	56
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU Tahun 2023	60
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja Tahun 2023	69
Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Keuangan per Jenis Belanja Tahun 2023	73
Tabel 3.15 Anggaran dan Realisasi Keuangan per Kegiatan Tahun 2023	73
Tabel 3.16 Hasil Perhitungan Efisiensi Berdasarkan Capaian Kinerja Outcome Tahun 2023.....	75
Tabel 3.17 Hasil Perhitungan Efisiensi (Output) per Sasaran Strategis Tahun 2023.	73
Tabel 4.1 Capaian Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2023.....	78

Daftar Lampiran

Lampiran 1	Kinerja Sasaran Strategis dan Penggunaan Dana/SDM (OH) Tahun 2023
Lampiran 2	Perbandingan Realisasi dan Capaian <i>Outcome</i> Tahun 2023 dengan Tahun 2021 Dan Target 2024
Lampiran 3	Rincian Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) beserta tingkat kesehatan/kinerja
Lampiran 4	Rincian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) beserta tingkat kesehatan/kinerja dan predikatnya
Lampiran 5	Rincian Kualitas Tata Kelola Pemda Provinsi
Lampiran 6	Rincian Kualitas Tata Kelola Pemda Kabupaten/Kota

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Perwakilan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan intern pemerintah dan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

BPKP memiliki 34 perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya adalah Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo yang merupakan perwakilan setingkat eselon II berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor B/306/M.PAN-RB/2/2013 tentang Perubahan Struktur 8 Perwakilan Madya menjadi Perwakilan Penuh (Tipe B) serta Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

1. Kedudukan

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo adalah instansi vertikal BPKP yang berada di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.

2. Tugas Pokok

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2023 jo Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan

Kuangan dan Pembangunan. BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Secara spesifik berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP. Perwakilan BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi BPKP dalam wilayah kerja perwakilan yang bersangkutan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan

nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;

- b. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
- c. pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
- d. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat

- kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
- e. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
 - f. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada satuan kerja instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundangundangan;
 - h. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
 - i. pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara/daerah; dan
 - j. pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, kesekretariatan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

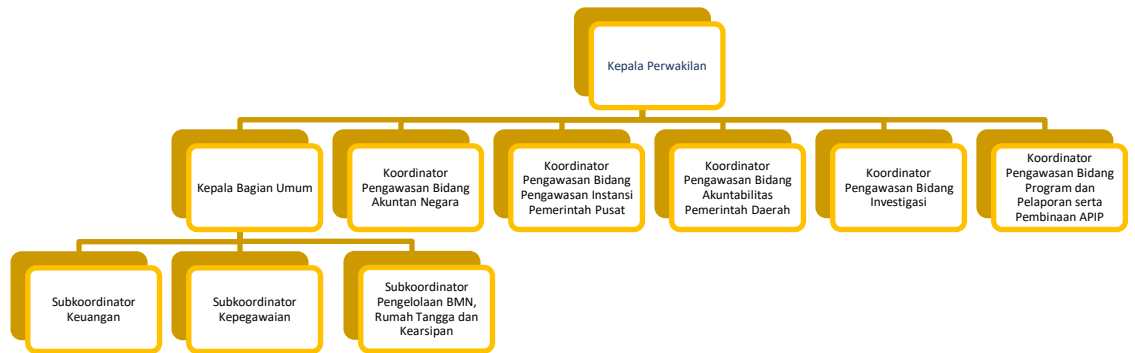
B. Struktur Organisasi Unit Kerja

1. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, bagan struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo



Sedangkan, struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo meliputi:

- Bagian Umum, yang terdiri dari Subkoordinator Keuangan, Subkoordinator Kepegawaian dan Subkoordinator Pengelolaan BMN, dan Subkoordinator Rumah Tangga dan Kearsipan;
- Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pengawasan Intansi Pemerintah Pusat (IPP);

- Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD);
- Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Akuntan Negara (AN);
- Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Investigasi;
- Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3A).

Adapun tugas dan fungsi masing-masing bagian/bidang adalah sebagai berikut:

- a. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan, persuratan, penggandaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan perpustakaan, protokoler, komunikasi dan informasi. Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Pengelolaan urusan kesekretariatan, persuratan, penggandaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan perpustakaan, protokoler,

komunikasi dan informasi; dan

- 2) Pengkoordinasian penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi di Perwakilan BPKP.
- b. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengelola kegiatan pengawasan serta mengendalikan mutu hasil pengawasan pada Instansi Pemerintah Pusat di daerah dan Pemerintah Daerah yang sumber dananya berasal dari APBN, Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Pinjaman Hibah Luar Negeri.
- c. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana,

- program, dan pengawasan instansi pemerintah daerah atas permintaan daerah serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas, dan evaluasi hasil pengawasan.
- d. Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) dan laporan akuntabilitas kinerja badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil dan kontrak kerjasama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, serta evaluasi hasil pengawasan.
- e. Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.
- f. Bidang P3A mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengelola, melaksanakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, penyiapan bahan laporan realisasi kegiatan, penyusunan laporan berkala atas hasil-hasil

pengawasan serta program pembinaan APIP (termasuk pembinaan jabatan fungsional auditor/JFA di lingkungan Perwakilan dan APIP Daerah).

Selain struktur organisasi tersebut di atas, terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yaitu Kelompok Jabatan Fungsional

Analisis Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis dan Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

2. Sumber Daya Manusia

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo didukung dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) sebanyak 75 orang dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pangkat Golongan Berdasarkan Pangkat Golongan, SDM Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tabel SDM Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Madya	IV d	1
2.	Pembina Utama Muda	IV c	2
3.	Pembina Tingkat I	IV b	4
4.	Pembina	IV a	4
5.	Penata Tingkat I	III d	10
6.	Penata	III c	6
7.	Penata Muda Tingkat I	III b	9

No	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
8.	Penata Muda	III a	5
9.	Pengatur Tingkat I	II d	5
10.	Pengatur	II c	27
11.	Pengatur Muda Tk. I	II b	0
12.	Pengatur Muda	II a	2
Jumlah			75

b. Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Jabatan, digambarkan sebagai SDM Perwakilan BPKP berikut: Provinsi Gorontalo dapat

Tabel 1.2
Tabel SDM Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo berdasarkan Struktur Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Struktural	2
2	Koordinator Pengawasan	5
3	Sub Koordinator	3
4	Fungsional Auditor	52
5	Fungsional Tertentu	5
6	Fungsional Umum	8
Jumlah		75

Berdasarkan komposisi Auditor:

Tabel 1.3
Tabel SDM berdasarkan Komposisi Auditor

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Auditor Madya	8
2	Auditor Muda	11
3	Auditor Pertama	8
4	Auditor Penyelia	3
5	Auditor Pelaksana	22
Jumlah		52

c. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan, SDM Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.4
Tabel SDM berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Strata Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2	10
2	S1/D4	27
3	D3	36
4	D1	2
Jumlah		75

d. Berdasarkan Usia

Berdasarkan Usia, SDM Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.5
Tabel SDM berdasarkan Usia

No	Kelompok Usia (tahun)	Jumlah (orang)
1	>55	2
2	51-55	11
3	41-50	7
4	31-40	19
5	<=30	36
Jumlah		75

C. Aspek Strategis Organisasi

Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tugas BPKP sejalan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023,

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, sebagai bagian integral dari BPKP sepenuhnya mendukung BPKP Pusat dalam menjalankan peran strategisnya yaitu sebagai **“Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Sesuai Rencana Strategis BPKP Tahun 2020-2024 dan penyesuaiannya, kegiatan yang menjadi tanggung jawab Perwakilan adalah Kegiatan Pengawasan Pembangunan, dengan 7 (tujuh) sasaran kegiatan strategis yang tertuang dalam Perjanjian Kerja, yaitu:

1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah;
2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional;
3. Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP.
4. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha;
5. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi;
6. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas

Pengendalian Intern
K/L/P/BU;

7. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja.

Selain itu juga *concern* terhadap, isu-isu strategis di wilayah Provinsi Gorontalo, antara lain:

1. Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bulango Ulu;
2. Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha di Pelabuhan Anggrek;
3. Integrasi data bantuan sosial pusat dan daerah;
4. Peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi dan manajemen risiko pembangunan nasional secara terstruktur;
5. Percepatan dan penyaluran penggunaan dana desa yang digunakan untuk percepatan pemulihan stabilitas ekonomi nasional/daerah/desa dan pengawasannya oleh APIP pasca Covid-19;
6. Tata kelola BUMDes, *Good Corporate Governance* (GCG) PDAM dan bentuk badan

hukum BUMD yang belum sesuai ketentuan berlaku;

7. Peningkatan pencegahan korupsi melalui pengukuran Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK);
8. Penilaian dan pengawasan risiko *fraud* pada kegiatan penyaluran bantuan sosial dan Pengadaan (PBJ);
9. Rencana penganggaran yang belum selaras antara program dan kegiatan dengan *ultimate goal* beserta pembiayaannya.

Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses bisnis pengawasan keuangan dan pembangunan selalu dilakukan *review* dan *best practices benchmarking* melalui studi literatur maupun studi ke entitas yang memiliki tata kelola pengawasan yang baik. Perbaikan yang terus-menerus tersebut, diharapkan akan menjadikan BPKP sebagai pembina yang lebih kompeten bagi aparat pengawasan pemerintah lainnya melalui kegiatan dan layanan eksternal dan internal, antara lain:

1. Melalui pemberian jasa *assurance* dan *consulting* yang diarahkan menuju kepada peran sebagai penggerak perubahan (*Service and Role of Internal Audit Element*);
2. Mengelola SDM BPKP agar profesional dengan pendidikan dan pelatihan serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama tim (*People Management Element*);
3. Pengawasan intern BPKP difokuskan pada kebutuhan *stakeholder* dengan memperhatikan risiko.
4. Memperbaiki metodologi pengawasan berdasarkan perbaikan proses internal maupun praktik-praktik terbaik pengawasan (*Professional Practices Element*);
5. Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi maupun individu, melalui SIMHP dan SIMA;
6. Sinergitas dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya dalam melakukan pengawasan lintas sektor, dan menjadi mitra pemerintah dalam tindak lanjut perbaikan manajemen hasil pemeriksaan BPK RI.
7. Memberikan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Daerah dan Korporasi dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dan efektif dengan mitra kerja (*Organizational Relationship and Culture Element*);
8. Melakukan pengawasan secara independen dengan kewenangan dan kekuasaan mandiri dalam rangka meningkatkan pengendalian intern dalam mitigasi risiko, meningkatkan kepatuhan dan mendorong tercapainya tujuan organisasi (*Governance Structure Element*).

Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern BPKP senantiasa dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, untuk memberi keyakinan bahwa tujuan BPKP dapat tercapai.

D. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja (LKj) ini menginformasikan pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Penyajian LKj 2023 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini:

Gambar 1.2
Sistematika Penyajian Laporan Kinerja (LKj)



BAB II

PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Merujuk pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024, BPKP melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BPKP secara nasional, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah menetapkan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Periode 2020-2024 pada 2 September 2020 sesuai dengan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor LSTRA-124/PW31/6/2020 tentang Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024. Renstra tersebut mengacu pada Renstra BPKP Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2020.

1. Pernyataan Visi

Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga

pimpinan tertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo menetapkan suatu

komitmen untuk mewujudkan visi BPKP ke depan yaitu:

“ Auditor internal pemerintah berkelas dunia dan *trusted advisor* pemerintah untuk meningkatkan good governance sektor publik dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah selaras dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional.

Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2020 atau setelahnya, visi BPKP diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sebagai penjabaran Visi BPKP yaitu “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk meningkatkan Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya persinggungan antara peran BPKP dengan beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional (NAWACITA) antara lain agenda kedua yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan fungsi yang dilak-

sanakannya, BPKP mengambil peran penting yang mengerucut sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

2. Pernyataan Misi

Visi yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Berdasarkan visi yang telah ditetapkan, dirumuskan misi-misi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sebagai berikut:



3. Kegiatan dan Sasaran Strategis

Sesuai Renstra BPKP Tahun 2020-2024, kegiatan yang menjadi tanggung jawab Perwakilan adalah Kegiatan Pengawasan Pembangunan,

dengan 6 sasaran strategis di awal berlangsungnya Renstra, dan kemudian disesuaikan menjadi 7 (tujuh) yaitu:

- a. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas

- Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah;
- b. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional;
 - c. Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP.
 - d. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha;
 - e. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi;
 - f. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU;
 - g. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja.

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKP merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang

menunjukkan peran utama BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

IKU BPKP merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPKP. IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat *outward looking* yaitu perspektif manfaat langsung bagi *stakeholders* eksternal yang menunjukkan peran utama BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Perspektif kedua bersifat *inward looking* yang menunjukkan manfaat bagi *stakeholders* internal BPKP. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis, serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. IKU digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur

dengan menggunakan indikator keluaran (*output*).

Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo untuk tahun 2020-2024 sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor LSTRA-124/PW31/6/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi,
- 2) Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi,
- 3) Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah,
- 4) Nilai penyelamatan keuangan negara,
- 5) Nilai penyelamatan pengelolaan dana transfer,
- 6) Nilai penyelamatan pengelolaan pembiayaan daerah,
- 7) Jumlah KP yang diawasi,
- 8) Jumlah KP yang tercapai sesuai target,
- 9) Jumlah Program Lintas Sektorial pembangunan daerah yang tercapai sesuai target,
- 10) Persentase desa yang diaudit kinerja dengan hasil Baik,
- 11) Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan,
- 12) Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik,
- 13) Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat,
- 14) Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat,
- 15) Jumlah Bumdes mampu menyusun LK,
- 16) Presentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan,

- 17) Presentase hasil pengawasan prefentif dan edukatif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan,
- 18) Jumlah pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi (EPK) baik,
- 19) Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi (EPK) baik,
- 20) Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq level 3,
- 21) Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP \geq level 3,
- 22) Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq level 3,
- 23) Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq level 3,
- 24) Persentase jumlah pemda yg akuntabel pengelolaan keuangan dan kinerja,
- 25) Tersedianya rekomendasi strategis kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota,
- 26) Persentase jumlah desa yg menyusun LPJ keuangan desa,
- 27) Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa dengan memadai,
- 28) Jumlah APIP yg mengimplementasikan Siswaskeudes,
- 29) Persentase BUMD dengan MRI \geq level 3,
- 30) Persentase BLUD dengan MRI \geq level 3,
- 31) Jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI \geq level 3,
- 32) Jumlah BLUD dengan kapabilitas SPI \geq level 3,
- 33) Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja,
- 34) Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi,
- 35) Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu,
- 36) Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja.
- 37) Skor IKPA unit kerja,
- 38) Persentase SPM yang terbit tepat waktu,

- 39) Persentase penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP,
- 40) Nilai pengelolaan BMN unit kerja,
- 41) Nilai SAKIP unit kerja,
- 42) Maturitas SPIP unit kerja,
- 43) Indeks MR unit kerja,
- 44) Indeks kualitas layanan ketatausahaan unit kerja,
- 45) Indeks kepuasan layanan unit kerja.

5. Sasaran Program

Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh pengelolaan pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kemampuan pengelolaan pencapaian visi,

misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh BPKP untuk dapat mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra BPKP berhasil dicapai. Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan tidak tercapainya suatu rencana. Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan.

Tabel 2.1

Target Kinerja Sasaran Program Renstra 2020-2024
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Untuk Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja <i>Outcome</i>	Satuan	Target
1 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/daerah	Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	347
	Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	578

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja <i>Outcome</i>	Satuan	Target
2 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	136.270
	Nilai penyelamatan keuangan negara	Rupiah (Juta)	56.500
	Nilai penyelamatan pengelolaan dana transfer	Rupiah (Juta)	122
	Nilai penyelamatan pengelolaan pembiayaan daerah	Rupiah (Juta)	61
	Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang diawasi	Buah	7
	Jumlah KP yang tercapai sesuai target	Buah	7
	Jumlah Program Lintas Sektorial pembangunan daerah yang tercapai sesuai target	Buah	1
	Persentase desa yang diaudit kinerja dengan hasil Baik	%	62,50
	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan,	%	85,00
	3 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	Unit
Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat		Unit	4
Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat		Unit	1
Jumlah BUMDes yang mampu menyusun LK		Unit	28
4 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	%	100
	Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	%	85
	Jumlah pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi (EPK) baik	Unit	3
	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi (EPK) baik	Unit	1
5 Meningkatkan Kualitas	Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq level 3	APIP	7

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja <i>Outcome</i>	Satuan	Target	
Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP \geq level 3	Pemda	7	
	Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq level 3	Pemda	1	
	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq level 3	Pemda	4	
	Persentase jumlah pemda yg akuntabel pengelolaan keuangan dan kinerja	%	1,11	
	Tersedianya rekomendasi strategis kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota	Rekomendasi	1	
	Persentase jumlah desa yg menyusun LPJ keuangan desa	%	54,95	
	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa dengan memadai	Unit	66	
	Jumlah APIP yg mengimplementasikan Siswaskeudes	Unit	3	
	Persentase BUMD dengan MRI \geq level 3	%	0	
	Persentase BLUD dengan MRI \geq level 3	%	2	
	Jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI \geq level 3	Unit	0	
	Jumlah BLUD dengan kapabilitas SPI \geq level 3	Unit	1	
	6 Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor	78
		Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	%	100
		Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	%	100
Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja		%	100	
Skor IKPA Unit Kerja		Skor	89	
Persentase SPM yang terbit tepat waktu		%	93	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja <i>Outcome</i>	Satuan	Target
	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	%	100
	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Skor	Baik
	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor	83
	Maturitas SPIP Unit Kerja	Skor	Level 3
	Indeks MR Unit Kerja	Skor	Level 3
	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Skor	81
	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja	Skor	80

6. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk menjalankan misi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang targetnya ditetapkan setiap tahun selama kurun waktu periode renstra yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) dan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan visi organisasi, dan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun.

Sasaran program pengawasan BPKP diharapkan dapat dicapai terlaksananya kegiatan-kegiatan utama pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional; pembinaan penyelenggaraan SPIP serta pembinaan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah. Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan tersebut terlihat seperti pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Tabel Target Kinerja Sasaran Kegiatan (*Output*)

	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2023
1	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	Laporan	2
2	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	Laporan Hasil Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	Laporan	2
3	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	Laporan	2
4	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	Laporan Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	Laporan	4
5	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur	Laporan Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	Laporan	4
6	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	Laporan Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	Laporan	4

	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2023
7	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	Laporan Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	Laporan	1
8	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor	Laporan Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	Laporan	2
9	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	Laporan Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	Laporan	2
10	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Laporan	8
11	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	Laporan	4
12	Tersedianya Dukungan Manajemen	Layanan Umum (Layanan Perencanaan, Keuangan, SDM, Komunikasi, dan Umum)	Layanan	1
		Layanan Umum (Layanan Penyelenggaraan SPIP dan RB)	Layanan	1
		Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	Unit	1
		Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Unit	1
		Layanan Sarana Internal (Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)	Unit	18

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2023
	Layanan Sarana Internal (Pembangunan Gedung Kantor dan/atau Rumah Negara)		

Berdasarkan Bidang Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, target *output* pengawasan sebesar 443 Laporan dapat dijelaskan sebagai berikut:

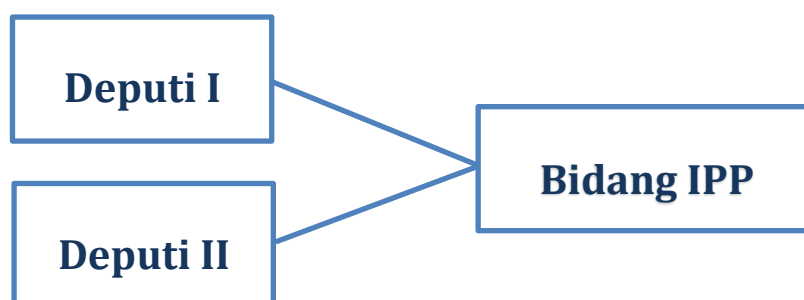
Tabel 2.3

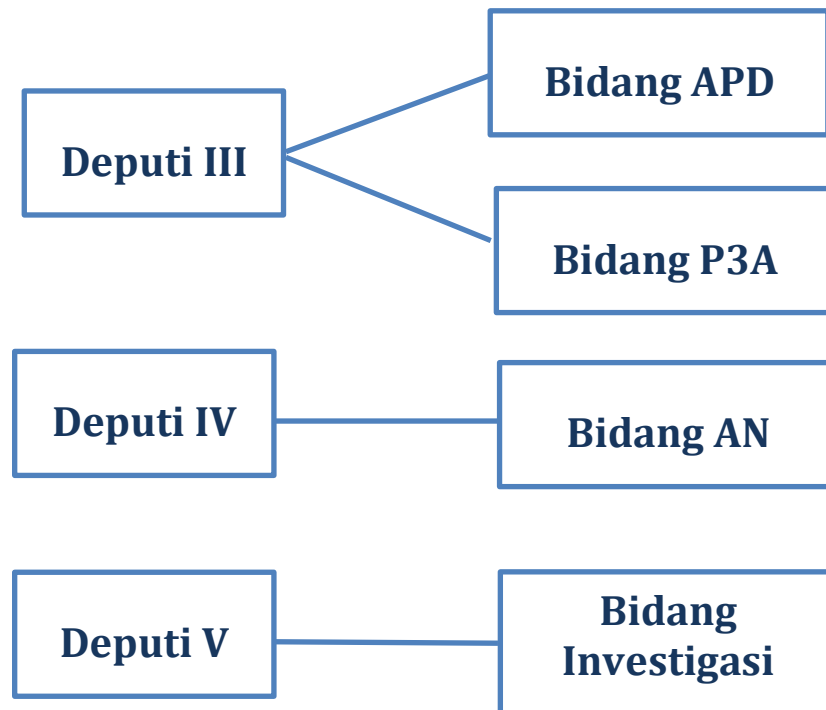
Tabel Target *Output* per Bidang

	Target Kinerja	Jumlah Laporan
Bidang	IPP	125
	APD	149
	AN	45
	Investigasi	78
	P3A	46
	TOTAL	443

Target *output* di atas berdasarkan target Laporan yang sudah ditetapkan oleh direktorat yang menjalankan fungsi perencanaan dan pengendalian (rendal) pada masing-masing kedeputian. Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo berfungsi melakukan kegiatan pengawasan di daerah sebagai dukungan kepada rendal untuk mencapai target tersebut. Jumlah *output* di atas akan berubah setiap tahun yang dijalani sesuai dengan target masing-masing rendal.

Gambar 2.1 Penyusunan Target *Output* Perwakilan





Perubahan atas desain penghitungan *output* perwakilan ini per tahun dijelaskan dalam Renja Tahunan.

Untuk mendukung ketercapaian sasaran program pengawasan, dilakukan dengan kegiatan dukungan pengawasan.

B. Perjanjian Kinerja 2023

1. Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2022

Kegiatan Pengawasan BPKP tahun 2023 didasarkan pada kebijakan di bidang pengawasan dan pembinaan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), RPJMN,

Renstra serta Renja 2020.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, kegiatan pengawasan yang mencakup tugas BPKP mencakup:

- a. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara dan atas kegiatan tertentu, yang meliputi kegiatan yang

bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, serta kegiatan lainnya berdasarkan penugasan presiden.

- b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko, meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi, serta peningkatan kompetensi APIP.

Kebijakan pengawasan BPKP juga mengacu kepada:

- a. RPJM 2020 - 2024 serta RKP 2023;
- b. Instruksi Presiden;
- c. Hasil Analisis Lingkungan Strategis;

- d. Isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan BPKP;
- e. Rencana Strategis (Renstra) BPKP 2020 - 2024.

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023

Sesuai dokumen perjanjian kinerja tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo mendukung tercapainya sasaran program Deputi/Sekretariat Utama dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk itu, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo bertanggung jawab untuk mencapai delapan sasaran program dan empat sasaran kegiatan dengan delapan belas indikator kinerja program dan enam indikator kinerja kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target
I Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah			
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rp (Juta)	2.643,67
1.2	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rp (Juta)	164.025,45
1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara	Rp (Juta)	42.492,57
II Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Nasional			
2.1	Persentase Hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85
2.2	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang diawasi	Topik APPD	2
III Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP			
3.1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen	80
IV Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha			
4.1	Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat	BUMD	2
4.2	Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat	BLUD	2
4.3	Jumlah Bumdes mampu menyusun laporan	BUM Des	40
4.4	Jumlah Bumdes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUM Des	7
V Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi			
5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	Persen	100
5.2	Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	Persen	85
5.3	Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Pemda	3

No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target
5.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	2
VI Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU			
6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Prov	1
6.2	Jumlah APIP kabupaten/kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/ Kota	6
6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Prov	1
6.4	Jumlah kabupaten/kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/ Kota	6
6.5	Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Prov	1
6.6	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/ Kota	4
6.7	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	6
6.8	Jumlah Desa yang pengelolaan Keuangannya akuntabel	Desa	25
6.9	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25
6.10	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	1
VII Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja			
7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor skala 100	80
7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82
7.3	Persentase Efektifitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70
7.4	Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100
7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75
7.6	Skor IKPA Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor skala 100	95
7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA








A. Capaian Kinerja Tahun 2023

1. Ringkasan Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo atas 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 32 (tiga puluh dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), menunjukkan bahwa rerata target untuk


setiap sasaran kegiatan telah tercapai. Ringkasan capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan pada setiap Sasaran Kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Ringkasan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2023






No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
I Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah						
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rp (Juta)	3.643,58	3.036,32	114,85	
1.2	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rp (Juta)	164.025,45	770.762,76	469,90	
1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara	Rp (Juta)	42.458,30	34.555,18	81,39	
Rerata capaian			209.161,69	808.354,26	386,47	
II Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Nasional						
2.1	Persentase Hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85	100	117,65	
2.2	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang diawasi	Topik APPD	2	2	100,00	
Rerata capaian					108,82	

No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
----	----------------------	--------	--------	-----------	-------------	--

III Meningkatkan Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP

3.1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen	80	100	125,00	
Rerata capaian					125,00	

IV Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

4.1	Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat	BUMD	2	3	150,00	
4.2	Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat	BLUD	2	3	150,00	
4.3	Jumlah Bumdes mampu menyusun laporan	BUM Des	40	39	97,50	
4.4	Jumlah Bumdes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUM Des	7	7	100,00	
Rerata capaian					124,38	



V Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi



5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan	Persen	100	100	100,00	
5.2	Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan	Persen	85	100	117,65	
5.3	Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Pemda	3	2	66,67	

No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
5.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	2	0	0,00	
Rerata capaian					71,08	

VI Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Prov	1	1	100,00	
6.2	Jumlah APIP kabupaten/kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/Kota	6	6	100,00	
6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Prov	1	1	100,00	
6.4	Jumlah kabupaten/kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	6	6	100,00	
6.5	Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Prov	1	1	100,00	
6.6	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	4	2	50,00	
6.7	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	6	1	16,67	
6.8	Jumlah Desa yang pengelolaan Keuangannya akuntabel	Desa	25	30	120,00	
6.9	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25	30	120,00	
6.10	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	1	3	300,00	
Rerata capaian					110,67	

No	Sasaran Kegiatan/IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
VII Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja						
7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor skala 100	80	78,76	98,45	
7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82	82,6	100,73	
7.3	Persentase Efektifitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70	100	142,86	
7.4	Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100	100	100,00	
7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	87,11	116,15	
7.6	Skor IKPA Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor skala 100	95	99,26	104,48	
7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80	101,28	126,60	
Rerata capaian					112,75	
Rerata capaian kinerja Sasaran Kegiatan					141,31	

Keterangan:  = mencapai/melampaui target,  = belum mencapai target

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo mampu mengelola risiko dalam kegiatan untuk meraih kinerja tahun 2023 di atas. Pada tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah berhasil

mengidentifikasi dan mengelola terkait pencapaian sasaran kegiatan. Sebaran risiko yang telah dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo disajikan dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
 Risiko untuk Setiap Sasaran Kegiatan pada Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Jumlah Risiko
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	23
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Nasional	1
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	4
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	3
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	9
6	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	5
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	32

Sumber data: RMIS

2. Uraian Kinerja

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/daerah

Capaian kinerja Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/daerah tahun 2023 adalah 386,47% dari target.

Keuangan Negara/Daerah adalah 336,43%. Capaian sasaran kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah diukur dengan 3 (tiga) IKK. Rincian capaian masing-masing IKK disajikan pada tabel 3.3.

Rerata capaian sasaran kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Juta	3.643,58	3.036,32	114,85	
1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Juta	164.025,45	770.762,76	469,90	
1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Juta	42.458,30	34.555,18	81,39	
Rerata capaian		Juta	209.161,69	808.354,26	386,47	

Capaian tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp491.257,35 juta atau 154,96% dibandingkan capaian tahun 2022, yaitu dari Rp317.013,62 pada tahun 2022 menjadi Rp808.270,97 juta pada tahun 2023.

Uraian kinerja masing-masing IKK untuk sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah sebagai berikut:

1.1 Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi

Capaian kinerja Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi tahun 2023 adalah sebesar Rp3.036 juta atau 114,85% dari target.

Capaian kinerja indikator nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 114,85% yaitu realisasi Rp3.036,32 juta dari target Rp2.643,58 juta. Bahkan capaian tahun 2023 melampaui target Renstra sebesar 875,02% dari target Rp347 juta.

Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi adalah Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang dapat direalisasikan berdasarkan hasil pengawasan BPKP. Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar peran BPKP dalam merealisasikan penerimaan daerah secara optimal, lengkap, tepat nilai dan bebas dari penyimpangan melalui kegiatan

pengawasan BPKP. Penerimaan daerah yang dimaksud sesuai dengan rincian sumber penerimaan APBD dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan daerah meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.

Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi diukur berdasarkan

jumlah kurang bayar PAD yang sudah disetor/ditetapkan berdasarkan bukti setor yang menjadi penerimaan daerah. Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi tahun 2023 sebesar Rp3.036,32 juta berasal dari hasil pengawasan dengan rincian tersaji dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Rincian Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi Tahun 2023

No.	Jenis Penerimaan	Nilai (Juta)
1	Pajak Daerah	3.036,32
2	Retribusi Daerah	0
	Jumlah	3.036,32

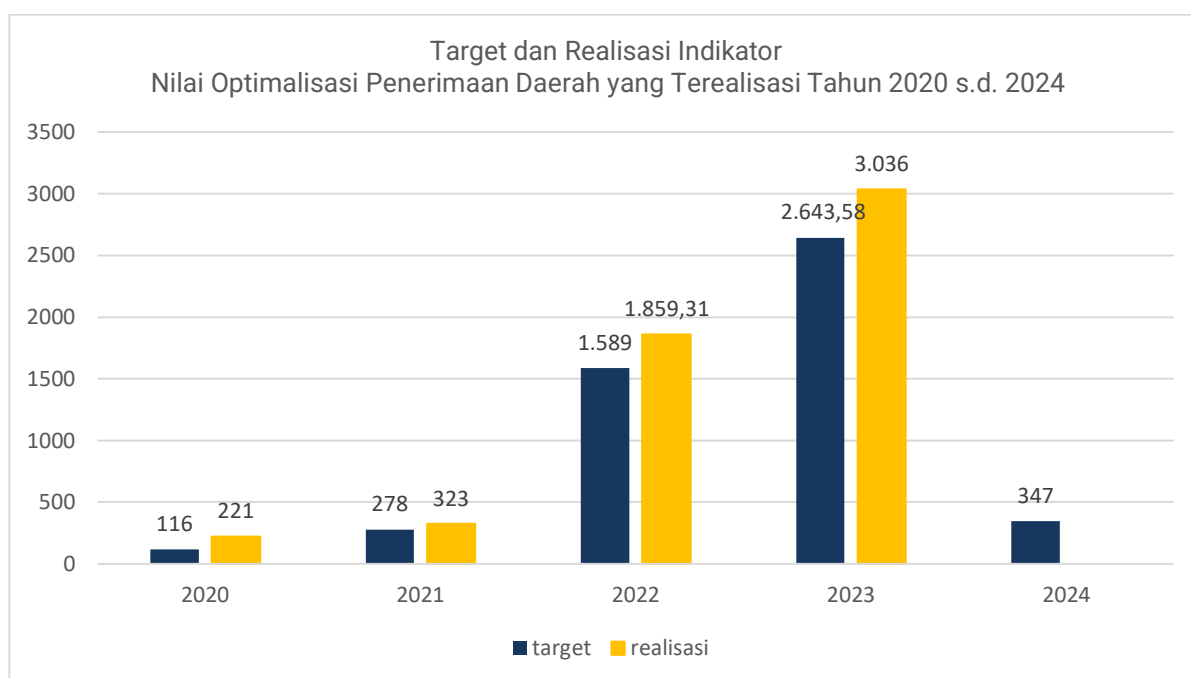
Realisasi kinerja Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi tahun 2023 naik sebesar Rp1.177 juta atau 63,29% dari realisasi tahun 2022.

Realisasi Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.177 juta atau 63,29% dari tahun 2022 sebesar Rp1.859,31 juta. Bahkan, realisasi tahun 2023 ini telah jauh melampaui target akhir Renstra sebesar Rp347 juta.

Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi tahun 2023 sebesar Rp3.036,32 juta berasal dari hasil pengawasan realisasi nilai optimalisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp3.036.315.224,00.

Perkembangan target dan realisasi Renstra untuk IKK Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada grafik 3.1.

Grafik 3.1



Tingginya realisasi capaian kinerja tahun 2023 disebabkan antara lain BPKP memberikan fasilitasi bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyusunan potensi PAD dan cara pencapaiannya, serta kegiatan pengawasan lainnya. BPKP juga bersinergi dengan Pemda dalam *monitoring* tindak lanjut hasil pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini menandakan tingginya komitmen Pemda untuk meningkatkan PAD, yang tentunya disesuaikan dengan potensi khas daerah masing-masing.

Risiko yang mungkin terjadi pada IKK ini yaitu keengganan masyarakat dalam membayar pajak daerah.

1.2

Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

Capaian kinerja Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp770.762,76 juta atau 469,90% dari target.

Capaian kinerja indikator Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah pada tahun 2023 adalah sebesar 469,90% yaitu realisasi Rp770.762,76 juta dari target Rp164.025,45 juta.

Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah adalah nilai yang menunjukkan besarnya pengurangan/pengalihan nilai pengeluaran yang direncanakan (belum direalisasi) yang tidak tepat

berdasarkan hasil pengawasan BPKP. Yang dimaksud dengan perencanaan tidak tepat antara lain adalah tidak berorientasi hasil, tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran, dan proses bisnis kegiatan tidak selaras dengan sasaran.

Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara/ Daerah diukur dengan menjumlahkan nilai pengurangan/pengalihan rencana belanja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak tepat dalam satu tahun anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Nilai anggaran/rencana belanja yang berpotensi menjadi lebih efektif dan efisien dikarenakan:

- 1) Dialihkan ke program/kegiatan/subkegiatan yang berdampak atau lebih hemat;
- 2) Rincian atau metodologi kegiatan diperbaiki sehingga berdampak atau lebih hemat;
- 3) Ukuran indikator keberhasilan diperbaiki sehingga terukur dan berorientasi hasil.

b. Nilai rupiah yang dapat dihemat melalui hasil pengawasan BPKP yang bersifat non-investigatif seperti audit penyesuaian harga, dan sebagainya.

c. Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah tahun 2023 sebesar Rp770.752,76 juta berasal dari hasil pengawasan dengan rincian tersaji dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Rincian Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah
Tahun 2023

No.	Jenis Penerimaan	Nilai (juta rupiah)
1	Audit Penyesuaian Harga (Eskalasi)	3.602,16
2	Penghematan keuangan Negara/Daerah Lainnya	767.150,60
Jumlah		770.752,76

Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara/ Daerah tahun 2023 sebesar Rp770.752,76 juta menunjukkan komitmen tinggi BPKP terhadap upaya pencegahan kebocoran keuangan

negara/daerah yang diwujudkan melalui serangkaian kegiatan pengawasan sepanjang tahun 2023. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Realisasi nilai penghematan keuangan negara/daerah sebesar Rp767.150,60 juta berasal dari; 3 kegiatan audit dana pinjaman dan bantuan luar negeri; 5 kegiatan audit penanganan darurat bencana; dan 7 kegiatan evaluasi perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi;
- b. Realisasi nilai koreksi berasal dari hasil penyesuaian harga (eskalasi) sebesar Rp3.602,16 juta diperoleh melalui kegiatan audit penyesuaian harga.

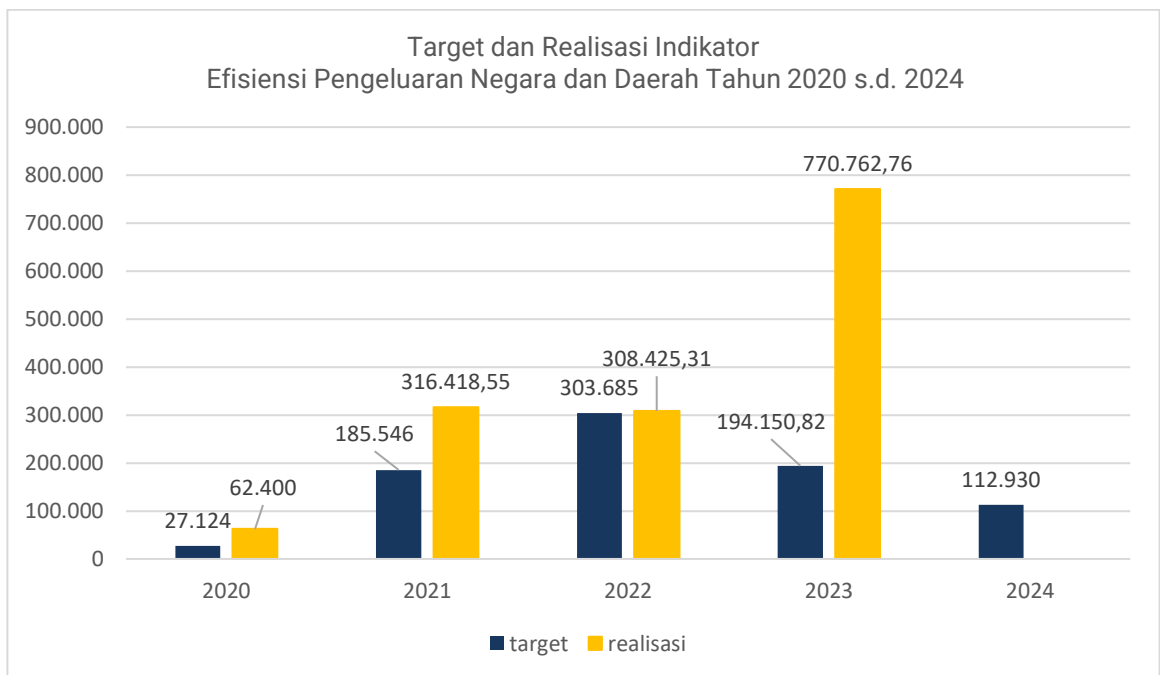
Rp462.327,45 juta atau 149,90% dari tahun 2022 yang sebesar Rp308.425,31 juta. Bahkan, realisasi tahun 2023 ini mencapai lebih dari 582,50% dari target akhir Renstra 2024 yang sebesar Rp112.930 juta.

Realisasi Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah tahun 2023 naik sebesar Rp462.327,45 juta atau 149,90% dari realisasi tahun 2022.

Target dan realisasi IKK Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah dibanding renstra tahun 2020 s.d. 2024 disajikan pada grafik 3.2.

Realisasi Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar

Grafik 3.2



1.3

Nilai Penyelamatan Keuangan Negara

Capaian kinerja Nilai Penyelamatan Keuangan Negara tahun 2023 adalah sebesar Rp34.555,18 juta atau 81,32% dari target.

Capaian kinerja indikator Nilai Penyelamatan Keuangan Negara pada tahun 2023 adalah sebesar 81,32% yaitu realisasi Rp34.555,18 juta dari target Rp42.492,57 juta.

Nilai Penyelamatan Keuangan Negara adalah nilai yang menunjukkan

besarnya jumlah nilai kerugian keuangan negara atau pengembalian ke kas negara atas belanja yang sudah direalisasikan dan atau pemulihan hak negara atas aset negara. Nilai Penyelamatan Keuangan Negara diukur dengan menjumlahkan nilai belanja yang dikembalikan ke kas negara, termasuk denda yang dikenakan dari hasil pengawasan BPKP dan nilai aset yang dipulihkan. Rincian Potensi Penyelamatan Keuangan Negara tersaji pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Potensi Penyelamatan Keuangan Negara
Tahun 2023

No.	Jenis Penerimaan	Nilai (juta rupiah)
1	Audit Investigatif	1.369,46
2	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)	33.102,43
3	Audit Penyelamatan Keuangan Negara Non-Investigatif	83,29
Jumlah		34.555,18

Kegiatan pengawasan yang ditujukan sebagai upaya penyelamatan keuangan negara yang dilakukan sepanjang 2023 adalah sebagai berikut:

- Nilai penyelamatan keuangan negara dari hasil audit investigatif berjumlah Rp1.369,46 juta dari 2 kegiatan pengawasan.
- Nilai penyelamatan keuangan negara dari hasil penghitungan

kerugian keuangan negara (PKKN) berjumlah Rp33.102,43 juta yang diperoleh melalui 8 kegiatan pengawasan perhitungan kerugian keuangan negara akibat korupsi.

- Nilai Penyelamatan Keuangan Negara Non-Investigatif sebesar Rp83,29 juta yang diperoleh melalui 2 kegiatan evaluasi atas efektivitas

penggunaan dana transfer ke daerah.

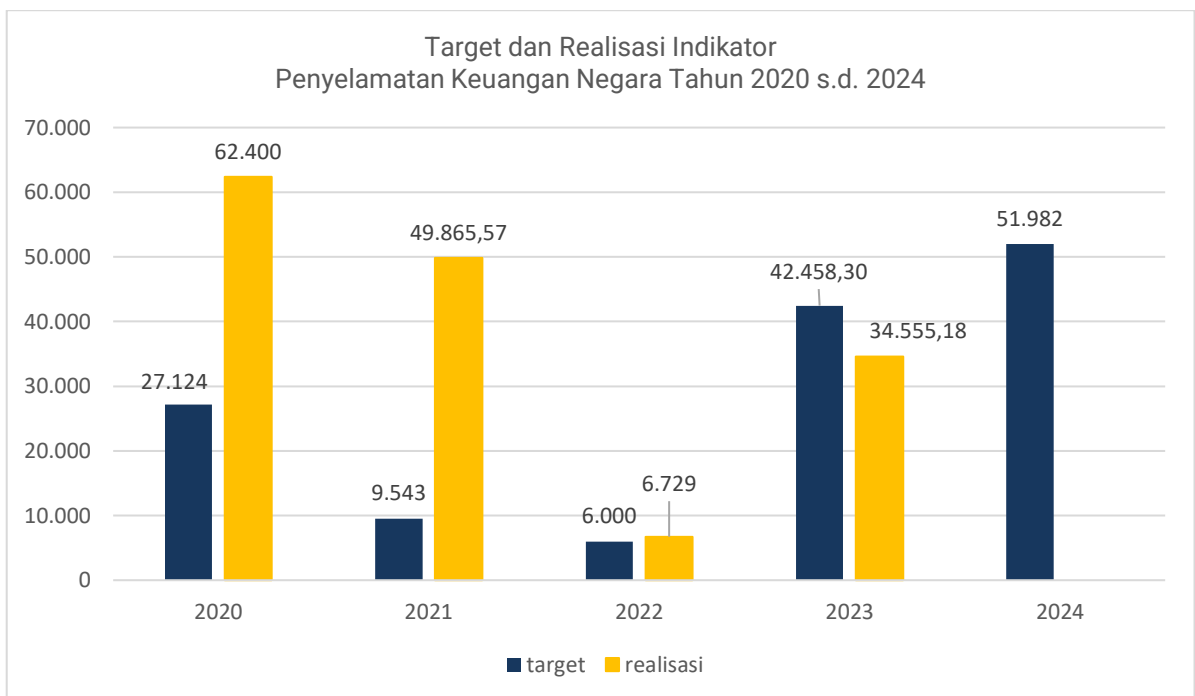
Realisasi Nilai Penyelamatan Keuangan Negara tahun 2023 naik sebesar Rp27.826,18 juta atau 413,53% dari realisasi tahun 2022.

Realisasi Penyelamatan Keuangan Negara tahun 2023 mengalami kenaikan

signifikan sebesar Rp27.826,18 juta atau 413,53% dari realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp6.729 juta.

Target dan realisasi kinerja dengan indikator Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dibandingkan renstra tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Grafik 3.3 berikut.

Grafik 3.3



Aktivitas-aktivitas pengawasan yang telah dilakukan pada tahun 2023 merupakan pengawasan atas penyelamatan keuangan negara sebagai berikut:

Audit Investigatif

- a. Audit Investigatif atas dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pengelolaan Dana Desa pada Desa Biluhu Tengah

Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 dengan nilai penyelamatan negara sebesar Rp740.017.877,00.

- b. Audit Investigatif atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Jalan Tenilo-Pilolodaa-Iluta pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan

Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 dengan nilai penyelamatan negara sebesar Rp629.449.033,38.

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)

- a. Audit PKKN atas kasus dugaan TPK dalam penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD PT. Global Gorontalo Gemilang tahun 2019 dengan nilai penyelamatan negara sebesar Rp897.514.518,00.
- b. Audit PKKN atas kasus dugaan TPK pada penyaluran/pemberian fasilitas kredit KUPEDES oleh PT Bank BRI (Persero) Tbk. Unit Sukamakmur Tolangohula Kab. Gorontalo Tahun 2019 sampai dengan 2020 dengan nilai penyelamatan negara sebesar Rp1.544.216.003,00.
- c. Audit PKKN atas kasus dugaan TPK pada proses pemberian KUR pada PT BRI (Persero) Tbk. Unit Bone Pantai pada tahun anggaran 2021 dengan nilai penyelamatan negara sebesar Rp3.483.857.875,00.
- d. Audit PKKN atas dugaan TPK penggunaan Dana Bantuan Sosial Kabupaten Bone Bolango TA 2011 dan 2012 dengan nilai penyelamatan negara sebesar Rp1.757 Juta.
- e. Audit PKKN atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan

Sumbangan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SR MBR) PDAM Bone Bolango (Perumda Tirta Bolango) Tahun Anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2021 dengan nilai penyelamatan negara sebesar Rp24.328 juta.

- f. Audit PKKN atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato Periode November 2020 s.d. Juni 2021 dengan nilai penyelamatan negara sebesar Rp657.900.000,00.
- g. Audit PKKN atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan konstruksi pembangunan/rehabilitasi Pasar Rakyat Liluwo Kota Gorontalo tahun anggaran 2015 dengan nilai penyelamatan negara sebesar Rp238.073.643,60.
- h. Audit PKKN atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan Dana Desa pada Desa Molonggota Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara T.A. 2020 dan 2021 dengan nilai penyelamatan negara sebesar Rp195.863.150,00.

Pengawasan atas Dana Transfer ke Daerah

- a. Evaluasi atas Efektivitas Penggunaan Dana Transfer Tahun 2023 pada Pemerintahan Kabupaten

Gorontalo dengan nilai penyelamatan negara sebesar Rp44.489.906,96.

b. Evaluasi atas Efektivitas Penggunaan Transfer ke Daerah

Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan nilai penyelamatan negara sebesar Rp38.805.025,30.

Sasaran Kegiatan 2




Capaian kinerja Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional tahun 2023 adalah 108,82 % dari target.

Rerata capaian sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional

Pembangunan Nasional adalah 108,82% dari target. Capaian sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional diukur dengan 2 (dua) IKK. Rincian capaian masing-masing IKK disajikan pada tabel 3.7.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Nasional Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
2.1	Persentase Hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85	100	117,65	
2.2	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang diawasi	Topik APPD	2	2	100,00	
	Rerata capaian				108,82	

Capaian tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 8,82% dibandingkan capaian tahun 2022, yaitu dari 100,00% pada tahun 2022 menjadi 108,82% pada tahun 2023.

Uraian kinerja masing-masing IKK untuk sasaran kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Nasional sebagai berikut:

2.1

Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan

Capaian kinerja Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan tahun 2023 adalah sebesar 100,00% atau 117,65% dari target.

Capaian kinerja indikator Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang diselesaikan pada tahun 2023 adalah sebesar 117,65% yaitu realisasi 100,00% dari target 85,00%.

Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan adalah persentase jumlah hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan dibagi dengan jumlah hambatan pelaksanaan pembangunan.

Rincian Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan berupa:

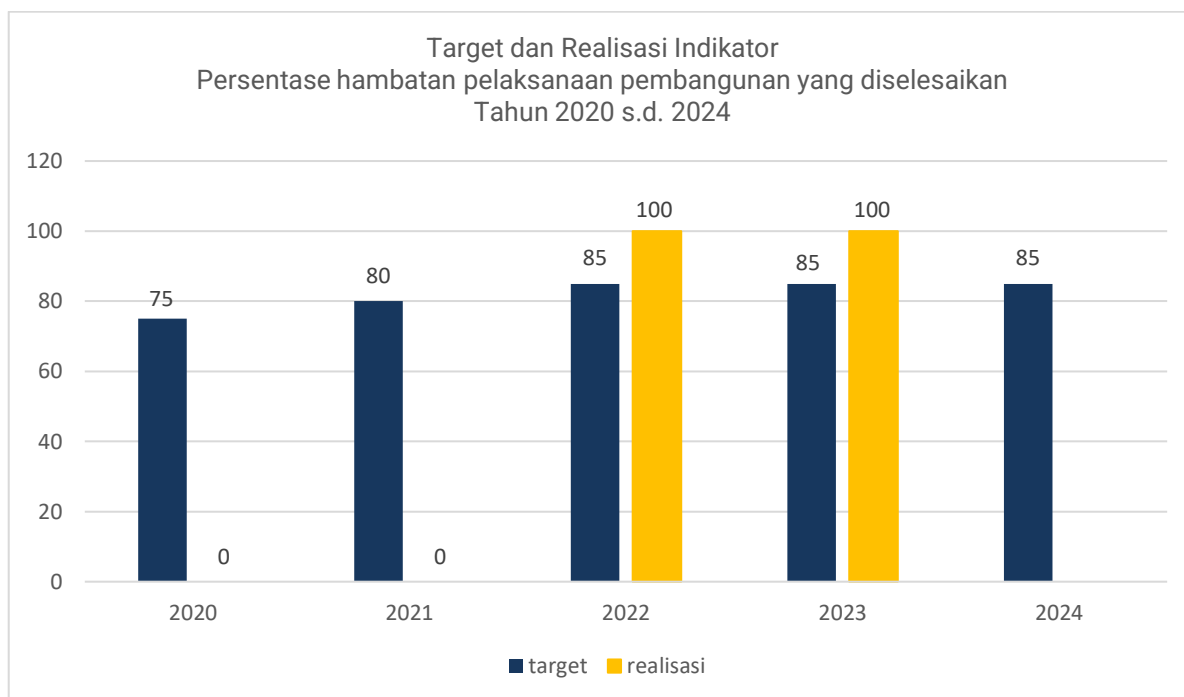
- Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Sektor Ketahanan Pangan di Provinsi Gorontalo.
- Kajian Hambatan Kelancaran Pembangunan pada Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Kelas IV Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara.

Realisasi Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan tahun 2023 sebesar 117,65% sama dengan realisasi tahun 2022.

Realisasi persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan tahun 2023 sebesar 117,65% sama dengan realisasi tahun 2022.

Target dan realisasi kinerja dengan indikator Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Grafik 3.4.

Grafik 3.4



Tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat IKK Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan pada Perkin tahun-tahun tersebut. Target yang disajikan dalam grafik merupakan target Renstra.

2.2 Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi

Capaian kinerja Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi tahun 2023 adalah sebesar 2 kegiatan prioritas daerah atau 100,00% dari target.

Realisasi capaian kinerja indikator Jumlah Kegiatan Pembangunan

Prioritas Daerah yang Diawasi pada tahun 2023 adalah sebesar 100% yaitu realisasi 2 kegiatan prioritas daerah dari target 2 kegiatan prioritas daerah.

Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi adalah jumlah kegiatan strategis daerah yang diprioritaskan untuk dilaksanakan yang dapat mengungkit perekonomian daerah. Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah diukur dengan menjumlahkan kegiatan pengawasan atas pembangunan prioritas daerah yang terealisasi. Rincian Jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi tersaji di Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi

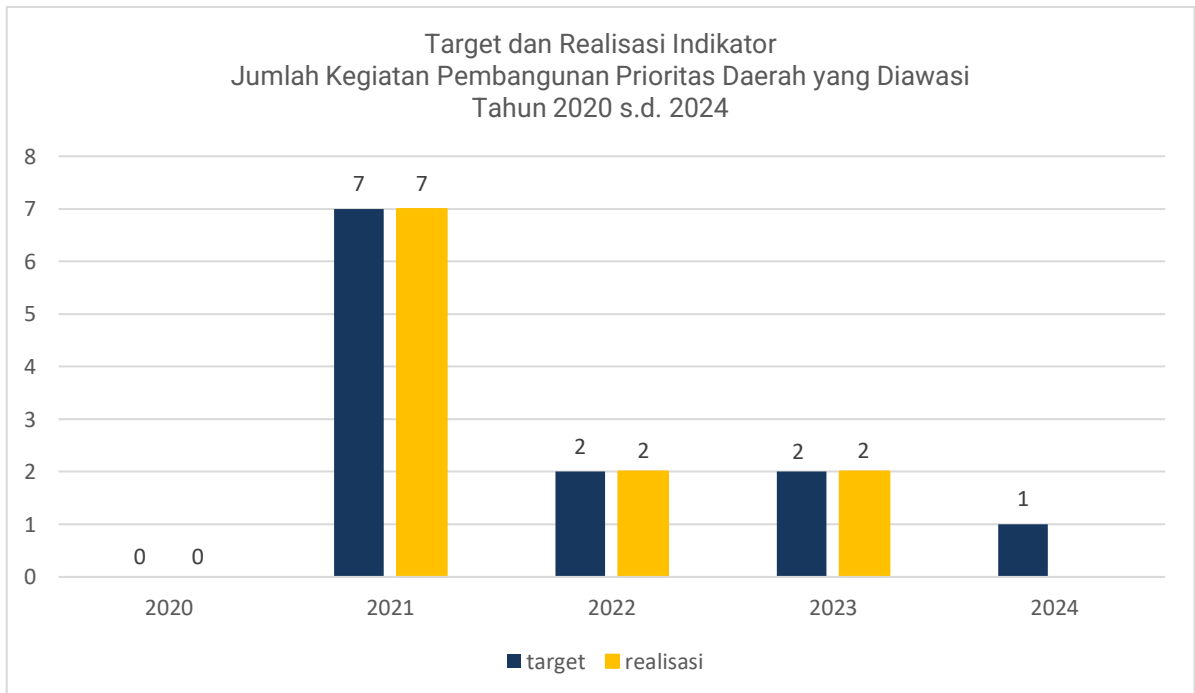
No.	Uraian
1	Evaluasi atas Revitalisasi Danau Limboto dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Danau dan Peningkatan Perekonomian Daerah
2	Evaluasi Program/Kegiatan Peningkatan Produktivitas Jagung di Provinsi Gorontalo

Realisasi jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi tahun 2023 sama dengan realisasi tahun 2022 yaitu 100,00% dari target.

diawasi sama dengan realisasi tahun 2022 yaitu 100,00% dari target. Target dan realisasi kinerja dengan indikator jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Grafik 3.5.

Realisasi jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang

Grafik 3.5



Sasaran Kegiatan

3

Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP



Capaian kinerja Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP tahun 2023 adalah 125,00% dari target.

Rerata capaian sasaran kegiatan Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada

K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP adalah 125,00%. Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan 1 (satu) IKK Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti. Rincian capaian IKK disajikan pada tabel 3.9.

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang Menjadi Tanggung Jawab Perwakilan BPKP Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen	80	100	125,00 
Rerata capaian					125,00 

Capaian tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 25% dibandingkan capaian tahun 2022, yaitu dari 100% pada tahun 2022 menjadi 125% pada tahun 2023. Uraian IKK untuk sasaran kegiatan Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP sebagai berikut:

3.1 Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti

Capaian kinerja Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti tahun 2023 adalah sebesar 100,00% atau 125,00% dari target.

Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti pada tahun 2023 adalah

sebesar 125,00% yaitu realisasi 100,00% dari target 80,00%.

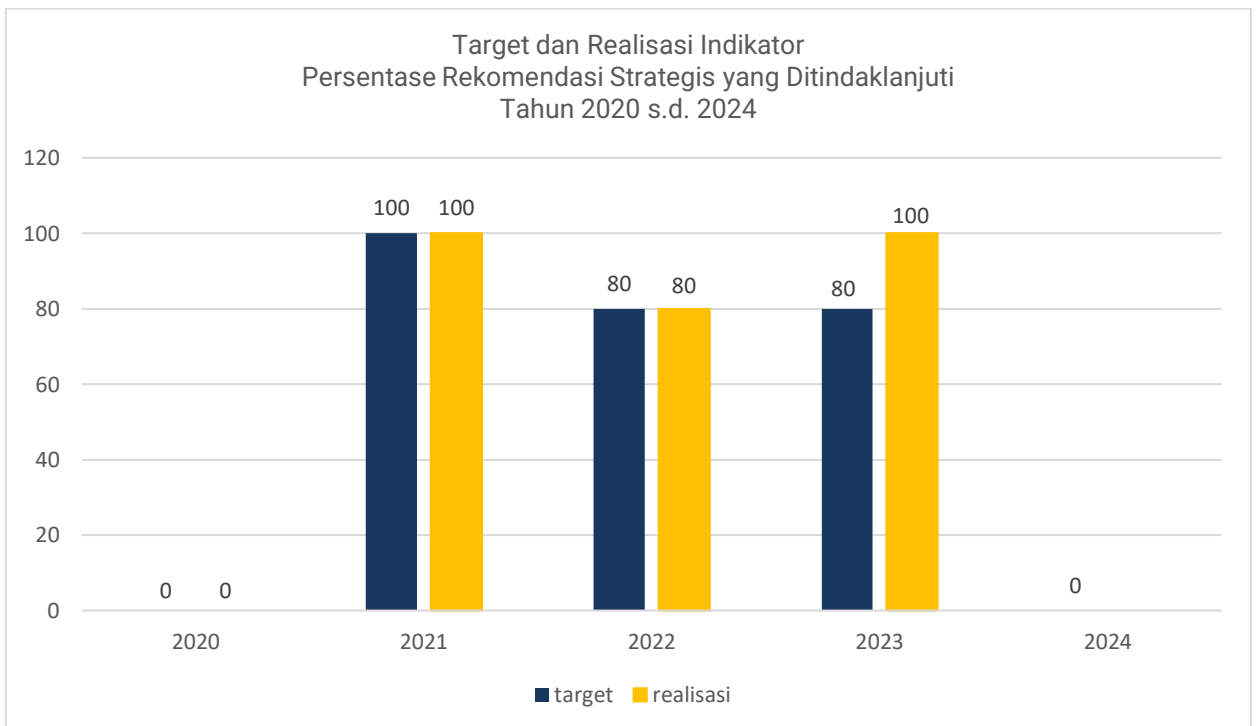
Rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti adalah rekomendasi kepada kepala daerah atas program lintas sektoral yang bernilai strategis bagi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti diukur dengan menghitung persentase antara jumlah rekomendasi yang disampaikan pada Gubernur dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Gubernur.

Realisasi Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti tahun 2023 naik sebesar 20% atau 125% dari realisasi tahun 2022.

Realisasi Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 25% dari realisasi tahun 2022 yang sebesar 80%.

Target dan realisasi kinerja dengan indikator Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti sesuai renstra tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Grafik 3.6

Grafik 3.6



Sasaran Kegiatan

4






Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

Capaian kinerja Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha tahun 2023 adalah 124,38% dari target.

atas Badan Usaha tahun 2023 adalah 124,38%. Capaian sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha diukur dengan 4 (empat) IKK. Rincian capaian masing-masing IKK disajikan pada tabel 3.10.

Rerata capaian sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Meningkatnya Pengawasan Pembangunan
atas Badan Usaha Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
4.1	Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat	BUMD	2	3	150,00	
4.2	Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat	BLUD	2	3	150,00	
4.3	Jumlah Bumdes mampu menyusun laporan	BUM Des	40	39	97,50	
4.4	Jumlah Bumdes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUM Des	7	7	100,00	
Rerata capaian					124,38	

Meskipun rerata capaian sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha tahun 2023 terlihat menurun dibanding tahun 2022, tetapi masih diatas 100% yakni berada pada nilai 124,38%. Adapun sasaran kegiatan

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha terdiri dari 4 indikator kinerja kegiatan dengan masing-masing uraian kinerja sebagai berikut:

4.1

Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat

Capaian kinerja Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat tahun 2023 adalah sebesar 3 BUMD atau 150,00% dari target.

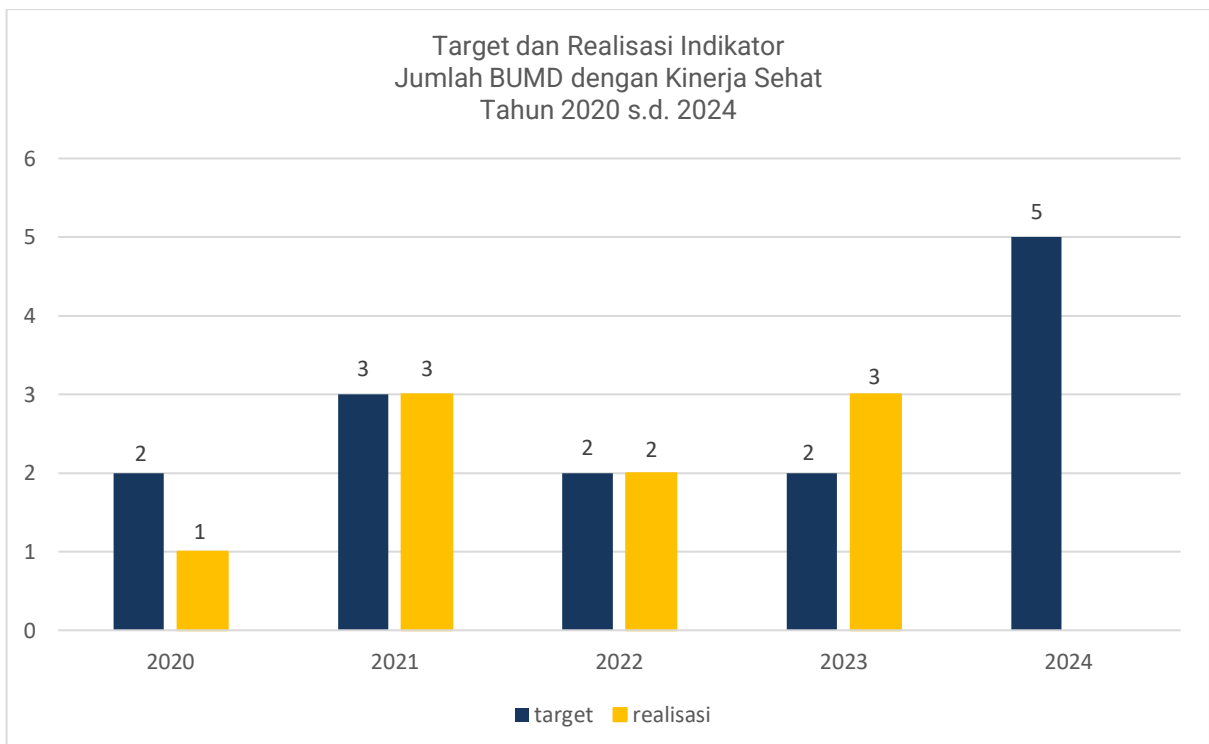
Capaian kinerja dengan indikator Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat pada tahun 2023 adalah sebesar 150,00% yaitu realisasi 3 BUMD dari target 2 BUMD. Adapun penilaian BUMD dengan kinerja sehat ini dilakukan pada enam PERUMDAM di provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Nomor

PW.02.02-Dc/223 tanggal 24 Februari 2023, dan menggunakan Buku Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja PDAM berdasarkan Keputusan Ketua BPPSPAM Nomor 002/KPTS/K-6/IV/2010.

Realisasi Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat tahun 2023 naik 1 BUMD atau 50,00% dari realisasi tahun 2022.

Target dan realisasi kinerja dengan indikator Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat pada Renstra tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Grafik 3.7.

Grafik 3.7



Capaian BUMD dengan Kinerja Sehat tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 1 BUMD menjadi 3 dari 2 BUMD dari tahun 2022.

Faktor Pendukung Pencapaian

Faktor pendukung tercapainya realisasi indikator kinerja Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat pada tahun 2023 adalah

1. Peningkatan cakupan pelayanan untuk meningkatkan jumlah pelanggan baru.
2. Perbaikan infrastruktur untuk mencapai *full cost recovery*

Risiko

Risiko yang terdapat dalam mencapai target indikator kinerja BUMD dengan Kinerja Sehat adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi hasil pengawasan tidak ditindak lanjut oleh *stakeholder*.
2. Auditi menolak/membatasi penugasan pengawasan

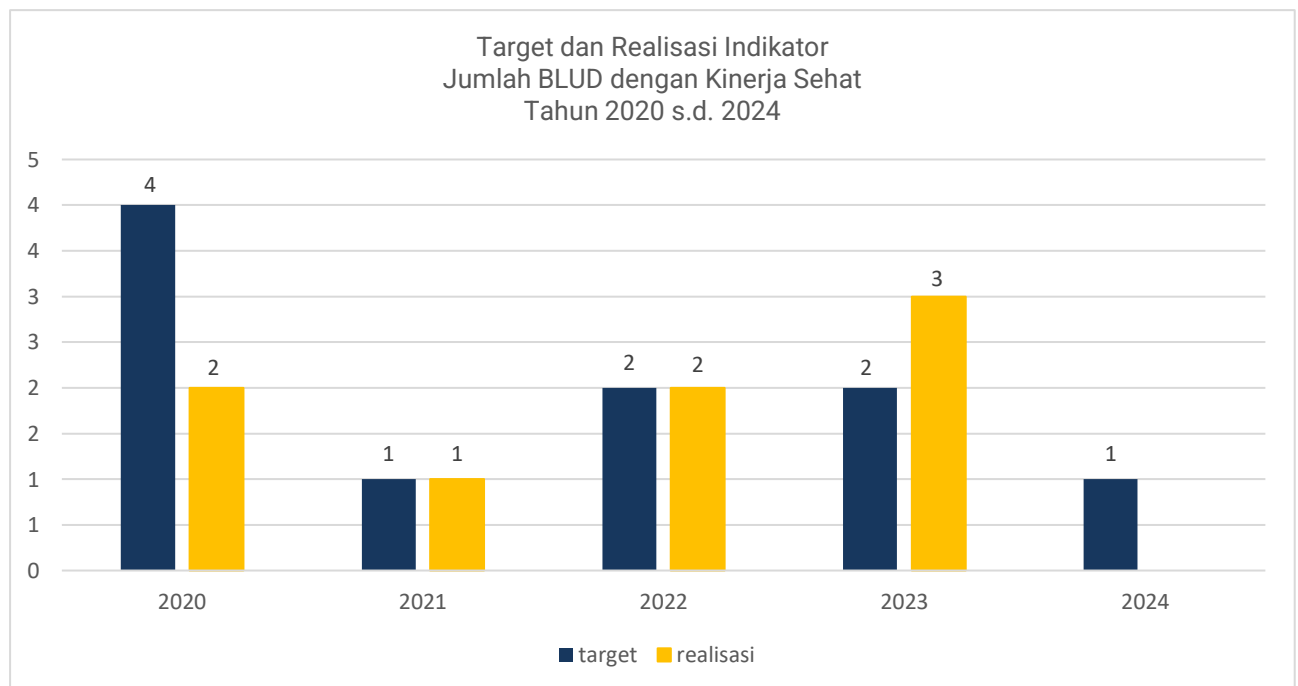
4.2

Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat

Capaian kinerja dengan indikator Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat pada tahun 2023 adalah sebesar 150,00% yaitu realisasi 3 BLUD dari target 2 BLUD. Persentase capaian Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat ini adalah persentase jumlah BLUD yang memiliki kinerja sehat dibagi dengan target jumlah BLUD dengan kinerja sehat.

Target dan realisasi kinerja dengan indikator Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Grafik 3.8.

Grafik 3.8



Capaian BLUD dengan Kinerja Sehat pada tahun 2023 mengalami kenaikan

sebanyak 1 BLUD menjadi 3 BLUD dibanding pencapaian tahun 2022

sebanyak 2 BLUD. Penilaian BLUD dengan Kinerja Sehat pada tahun 2023 dilakukan sesuai dengan pedoman Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Kinerja dan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.

Faktor Pendukung Pencapaian

Faktor pendukung tercapainya realisasi indikator kinerja Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat pada tahun 2023 adalah Perencanaan strategis dalam mendukung tata kelola BLUD. Pengembangan aplikasi berupa SIM RS dalam mendukung kinerja BLUD.

Risiko

Risiko yang terdapat dalam mencapai target indikator kinerja BLUD dengan Kinerja Sehat adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi hasil pengawasan tidak ditindak lanjut oleh *stakeholder*.

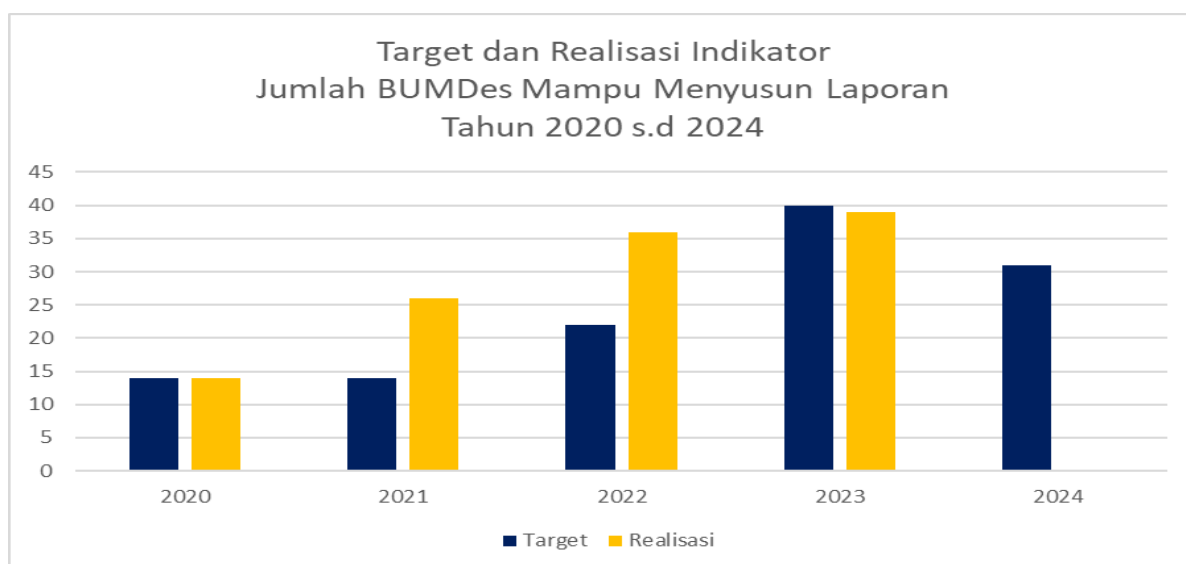
2. *Stakeholder* tidak menyiapkan/menyerahkan data.

4.3 Jumlah Bumdes Mampu Menyusun Laporan Keuangan

Capaian kinerja dengan indikator Jumlah BUMDes Mampu Menyusun Laporan Keuangan pada tahun 2023 adalah sebesar 97,50 % yaitu realisasi 39 BUMDes dari target 40 BUMDes. Penilaian BUMDes Mampu Menyusun Laporan Keuangan pada tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada pedoman Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor PE.09.02/S-1023/D4/05/2023 tanggal 15 Agustus 2023 hal Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas dan Tata Kelola BUM Desa.

Target dan realisasi kinerja dengan indikator Jumlah BUMDes Mampu Menyusun Laporan Keuangan tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Grafik 3.9.

Grafik 3.9



Kendala Ketidaktercapaian

Kendala ketidaktercapainya indikator kinerja Jumlah BUMDes Mampu Menyusun Laporan Keuangan Keuangan pada tahun 2023 adalah:

1. Lemahnya tata kelola BUMDesa/BUMDesa Bersama dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional.
2. Kurangnya SDM yang kompeten dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes yang akuntabel.

Risiko

Risiko yang terdapat dalam mencapai target indikator kinerja Jumlah BUMDes Mampu Menyusun Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Permintaan kegiatan *Consulting* (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) dari Mitra tidak bisa dipenuhi.

2. Hasil *Consulting* (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh Mitra Kerja.
3. Hasil pengawasan tidak digunakan oleh Mitra Kerja.
4. Fasilitator kurang mampu/kompeten dalam melakukan asistensi, workshop ataupun bimbingan teknis.

Rencana Aksi

Rencana Aksi Capaian kinerja dengan indikator Jumlah BUMDes Mampu Menyusun Laporan yang akan dilakukan adalah melakukan pendampingan kepada Pengelola BUMDes/ BUMDesa Bersama dalam rangka peningkatan pelaksanaan tata kelola BUMDes/ BUMDesa Bersama.

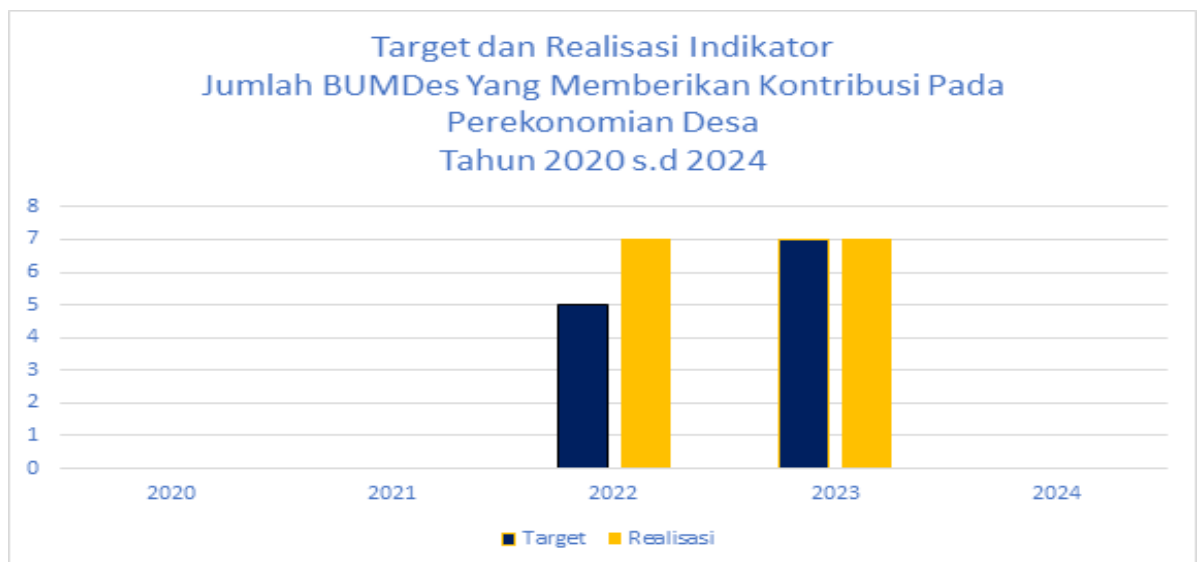
4.4

Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa

Capaian kinerja dengan indikator Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada perekonomian desa pada tahun 2023 adalah sebesar 100,00% yaitu realisasi 7 dari target 7 BUMDes. Tidak terdapat target dan realisasi indikator dengan jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa pada tahun

2020 dan 2021. Pada tahun 2023, terdapat kenaikan target jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa menjadi 7 BUMDes. Sementara jumlah realisasi jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa sama dengan tahun 2022. Target dan realisasi kinerja dengan indikator jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada grafik 3.10.

Grafik 3.10



Capaian BLUD dengan Kinerja Sehat pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 1 BLUD menjadi 3 BLUD dibanding pencapaian tahun 2022 sebanyak 2 BLUD.

Faktor Pendukung Pencapaian

Faktor pendukung tercapainya realisasi jumlah BUMDes Yang Memberikan

Kontribusi pada Perekonomian Desa pada Tahun 2023 adalah kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menyebutkan bahwa salah satu tujuan BUMDesa/ BUMDesa Bersama yaitu memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-

besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa.

Risiko

Risiko yang terdapat dalam mencapai target indikator kinerja Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada 3.

Perekonomian Desa adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi hasil pengawasan tidak ditindak lanjut oleh *stakeholder*.
2. Auditi menolak memberikan data yang dibutuhkan

Sasaran Kegiatan 5



Capaian kinerja Meningkatnya Pengawasan Pembangunan Efektivitas Pengendalian Korupsi tahun 2023 adalah 129,41% dari target.




Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

Korupsi tahun 2023 adalah 71,08%. Capaian sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan Efektivitas Pengendalian Korupsi diukur dengan 4 (empat) IKK. Rincian capaian masing-masing IKK disajikan pada tabel 3.11.

Rerata capaian sasaran kegiatanMeningkatnya Pengawasan Pembangunan Efektivitas Pengendalian

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Meningkatnya Pengawasan Pembangunan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan	Persen	100	100	100,00	
5.2	Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan	Persen	85	100	117,65	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
5.3	Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Pemda	3	2	66,67	
5.4	Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Badan Usaha	2	0	0	
Rerata capaian					71,08	

Capaian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 28,92% dibandingkan capaian tahun 2022, yaitu dari 100,00% pada tahun 2022 menjadi 71,08% pada tahun 2023.

Uraian kinerja masing-masing IKK untuk sasaran kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan Efektivitas Pengendalian Korupsi sebagai berikut:

5.1

Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Ditindaklanjuti/Dimanfaatkan

Capaian kinerja Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan tahun 2023 adalah sebesar 100 persen atau 100,00% dari target.

Capaian kinerja indikator Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Ditindaklanjuti/Dimanfaatkan pada tahun 2023 adalah sebesar 117,65% yaitu realisasi 100% persen dari target 80,00%.

Hasil pengawasan represif berupa audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Audit Investigatif ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh Aparat Penegak Hukum dalam bentuk pemberian keterangan ahli oleh Auditor BPKP. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan penugasan Audit PKKN dan Audit Investigatif atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi sebanyak 10 penugasan dan telah dilanjutkan dengan pemberian keterangan ahli kepada penyidik sebanyak 16 penugasan dan pemberian keterangan ahli di persidangan tipikor sebanyak 13 penugasan.

5.2

Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Ditindaklanjuti/Dimanfaatkan

Capaian kinerja indikator Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Ditindaklanjuti/

Dimanfaatkan pada tahun 2023 adalah sebesar 117,65% yaitu realisasi 100% dari target 85,00%.

Pengawasan Preventif dan Edukatif yang dilaksanakan tahun 2023 dan telah ditindaklanjuti adalah:

- Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) dengan ruang lingkup mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo;
- Coaching Clinic kepada Inspektorat Kabupaten Pohuwato yaitu layanan konsultasi pengawasan bidang investigasi secara sinergis dan kolaboratif kepada APIP dengan tujuan untuk membantu mitra (coachee) mengembangkan kompetensi dan meningkatkan kinerja pengawasan bidang investigasi, dengan cara memadukan kegiatan sosialisasi, asistensi dan bimbingan teknis mengenai pemberian keterangan ahli di persidangan.

Fraud Control Plan (FCP) yaitu pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah & menangkal, mendeteksi, dan merespon kejadian berindikasi fraud. Bentuk kegiatan adalah sosialisasi dan Diagnostic Assessment pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

5.3

Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik

Dalam rangka mendukung efektifitas pengenalan korupsi yang baik telah dilakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK) pada tiga pemerintah daerah yaitu Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo.

Hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas SPIP terintegrasi untuk paramemeter IEPK diperoleh capaian Pemerintah Provinsi Gorontalo 3,378, Kab. Gorontalo 3,000, dan Kota Gorontalo 3,000. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh capaian untuk Provinsi Gorontalo 2,814 dan Kab. Gorontalo 2,530, dan Kota Gorontalo 2,598. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022, pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang berarti, berupa komitmen dan upaya untuk meningkatkan indeks efektifitas pengendalian korupsi menjadi baik pada Provinsi Gorontalo dari 2,742 menjadi 2,814 dan Kabupaten Gorontalo dari 1,747 menjadi 2,530.

Dari 3 pemerintah daerah yang telah dilakukan bimbingan teknis indeks

efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) sebanyak 2 pemda dapat dikategorikan baik karena hasil evaluasi SPIP terintegrasi menunjukkan adanya peningkatan skor IEPK dibandingkan tahun 2022.

Satu pemda yaitu Pemerintah Kota Gorontalo berdasarkan hasil evaluasi SPIP terintegrasi belum menunjukkan adanya peningkatan skor IEPK dan terdapat area yang perlu perbaikan antara lain yaitu terkait dukungan sumber daya berupa penyediaan alokasi sumber daya untuk mendukung program antikorupsi, baik anggaran, personal, dan sarana prasarana

5.4

Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik

Telah dilakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap IEPK dan system pengendalian intern pada dua PDAM yaitu PDAM

Kabupaten Boalemo dan PDAM Kab. Gorontalo

Hasil skor IEPK untuk PDAM Boalemo dan Kabupaten Gorontalo masing-masing 41,17% dan 42,61% dengan simpulan efektivitas pada posisi terendah yaitu "Belajar." (dengan kriteria urutan tertinggi s.d. terendah adalah bersih (95% - 100%), berubah (80 - <95%), bekerja (60% - < 80%), dan belajar (< 60%)). Penyebab utamanya adalah personil pada PDAM belum memahami perangkat-perangkat pengendalian anti korupsi yang diperlukan.

Terdapat area yang perlu perbaikan untuk meningkatkan skor dan implementasi IEPK terkait kebijakan antikorupsi, seperangkat system antikorupsi, pembelajaran antikorupsi, assessment dan mitigasi risiko, saluran pelaporan internal yang efektif dan kredibel, investigasi serta tindakan korektif yang harus segera dilaksanakan.

Sasaran Kegiatan

6








Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU





Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU tahun 2023 adalah 100,61% dari target.

Rerata capaian sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU tahun 2023 adalah 110,67% atau 100,00% dari target.

Capaian sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU diukur dengan 10 (sepuluh) IKK. Rincian capaian masing-masing IKK disajikan pada tabel 3.12.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Prov	1	1	100,00	
6.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/Kota	6	6	100,00	
6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Prov	1	1	100,00	
6.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	6	6	100,00	
6.5	Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Prov	1	1	100,00	
6.6	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	4	2	50,00	
6.7	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	6	1	16,67	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
6.8	Jumlah Desa yang pengelolaan Keuangannya akuntabel	Desa	25	30	120,00	
6.9	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25	30	120,00	
6.10	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	1	3	300,00	
Rerata capaian		Prov	1	1	110,67	

Capaian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,60% dibandingkan capaian tahun 2022, yaitu dari 112,27% pada tahun 2022 menjadi 110,67% pada tahun 2023.

Uraian kinerja masing-masing IKK untuk sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU sebagai berikut:

6.1 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Realisasi Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 tahun 2023 sama dengan realisasi tahun 2022 yaitu 100,00%.

Capaian kinerja indikator Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 pada tahun 2023 adalah sebesar 100,00% yaitu realisasi 1 provinsi dari target 1 provinsi. Kapabilitas APIP merupakan indikator penting

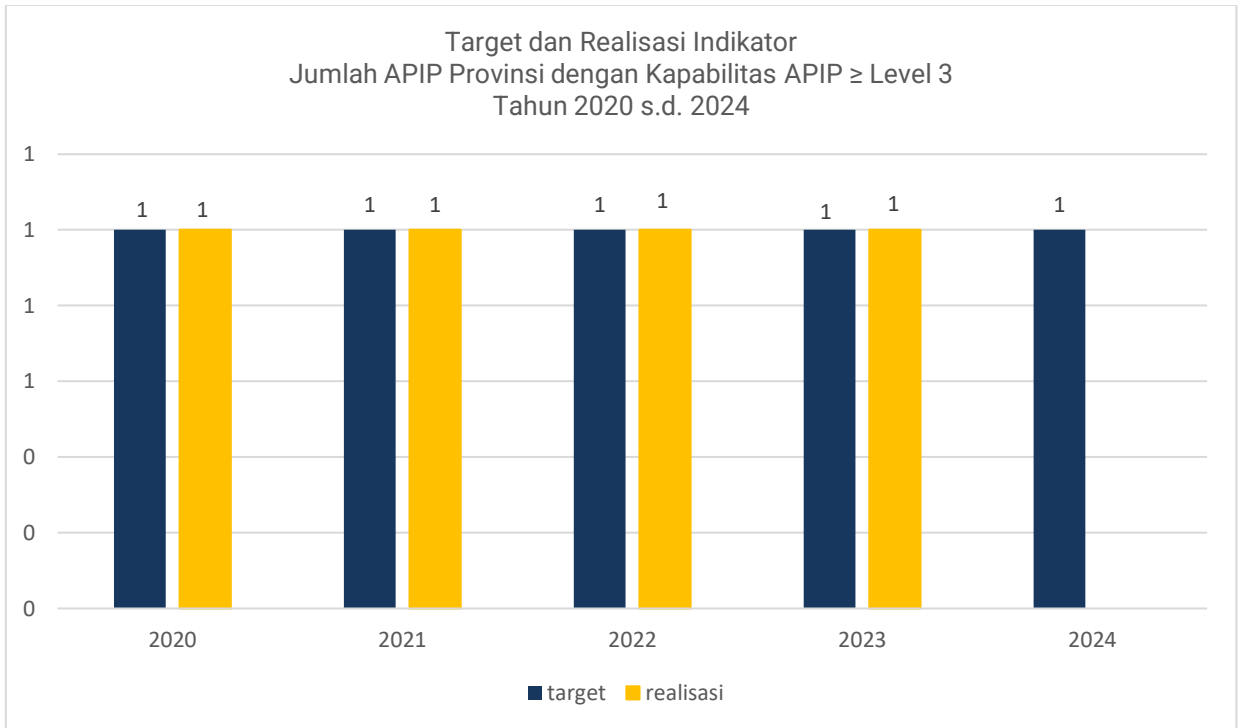
untuk melihat sejauh mana APIP sebagai institusi telah mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Inspektorat Provinsi Gorontalo selaku APIP Provinsi telah mencapai kapabilitas level 3 dengan penilaian terbaru dengan skor 3,06.

Capaian kinerja Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 tahun 2023 adalah sebesar 1 Provinsi atau 1 Provinsi dari target.

Realisasi Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 tahun 2023 sama dengan realisasi tahun 2022 yaitu 100%.

Target dan realisasi kinerja dengan indikator Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Grafik 3.11.

Grafik 3.11



6.2

Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3

Capaian kinerja indikator Jumlah APIP

Capaian kinerja indikator Jumlah APIP kabupaten/kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 pada Tahun 2023 adalah sebesar 100%, yaitu realisasi 6 (enam) kabupaten/kota dari target 6 (enam) kabupaten/kota.

kabupaten/kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 pada Tahun 2023 adalah sebesar 100%, yaitu realisasi 6 (enam) kabupaten/kota dari target 6 (enam) kabupaten/kota.

APIP kabupaten/kota yang memiliki kapabilitas Level 3 diharapkan bisa melakukan layanan assurance dan consulting yang baik

kepada para stakeholders. Layanan tersebut harus didukung dengan komponen enabler yang memadai guna mencapai level yang diharapkan.

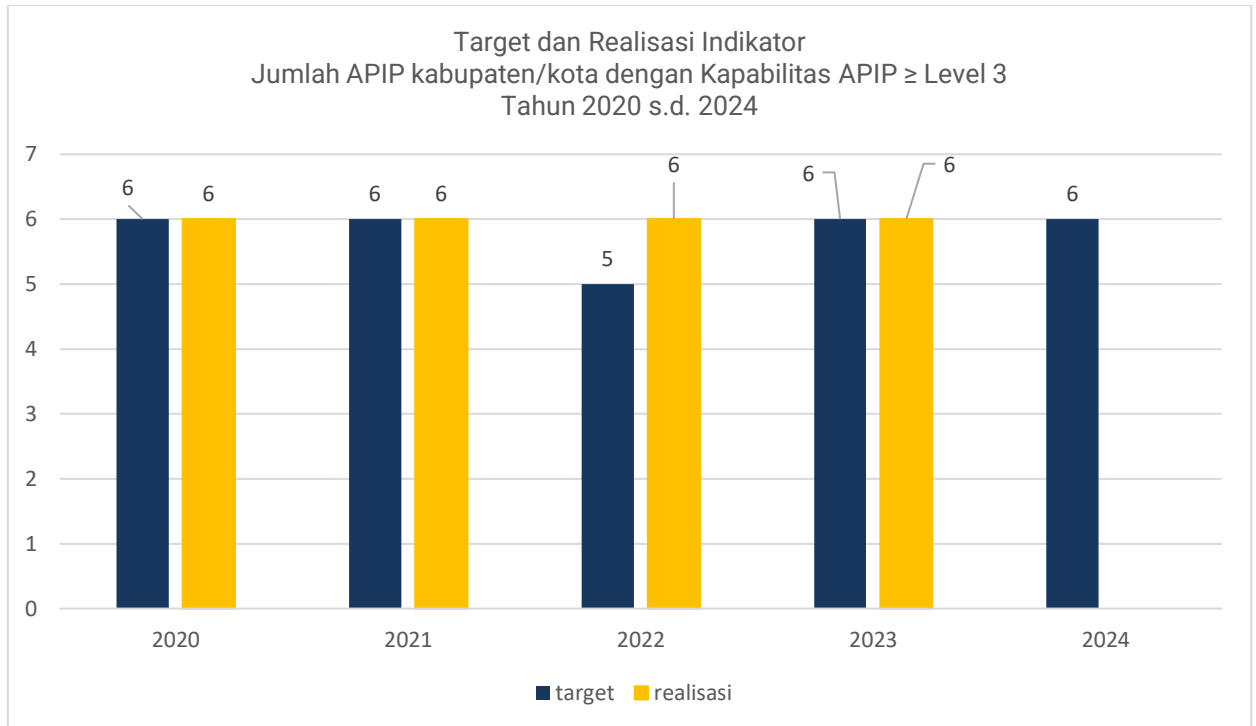
Target dan realisasi kinerja dengan indikator Jumlah APIP kabupaten/kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 pada Renstra tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Grafik 3.11

Realisasi Jumlah APIP kabupaten/kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 tahun 2023 sama dengan realisasi tahun 2022 yaitu 100%.

Realisasi Jumlah APIP kabupaten/kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 tahun 2023 sama dengan realisasi tahun 2022 yaitu 100%.

Target dan realisasi kinerja dengan indikator Jumlah APIP kabupaten/kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 sesuai Renstra tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Grafik 3.12

Grafik 3.12



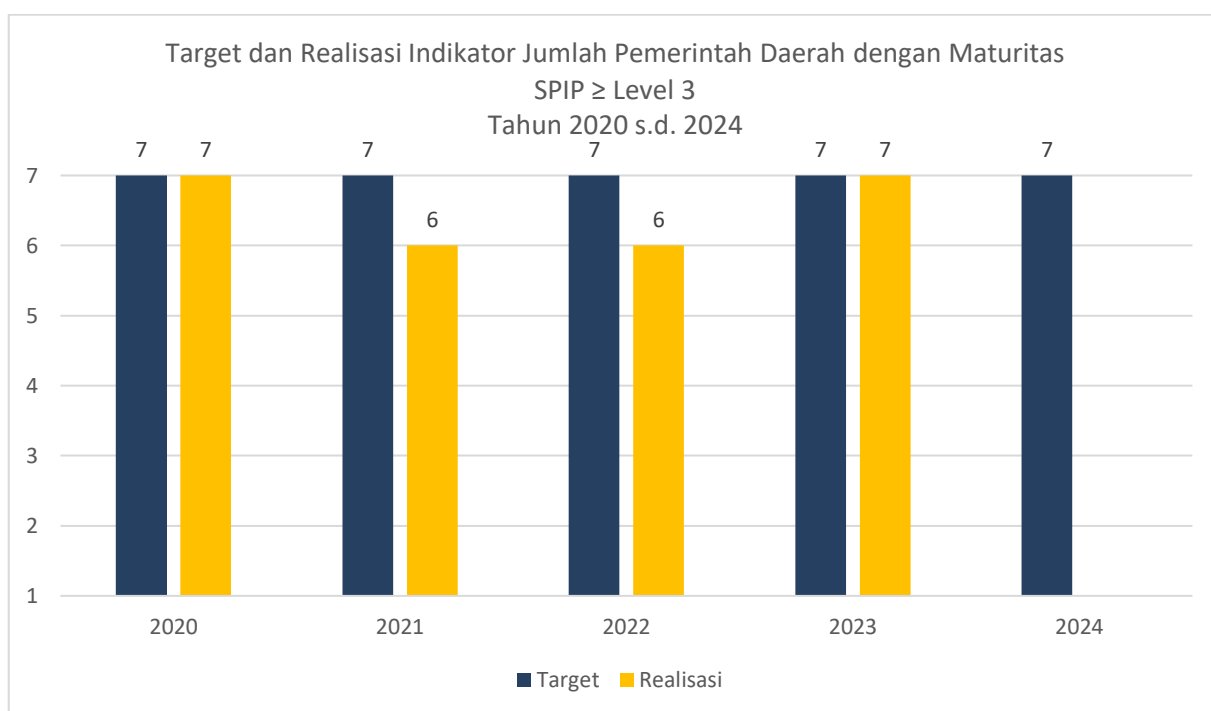
6.3 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Capaian kinerja indikator Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 pada tahun 2023 adalah sebesar 100,00% yaitu realisasi 100 persen dari target 1 Provinsi.

Pemerintah daerah di wilayah Provinsi Gorontalo sejumlah tujuh pemda (1

provinsi dan 6 kab/kota) telah mencapai kapabilitas level 3 dengan penilaian terbaru sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian /Lembaga/ Pemerintah Daerah. Target dan realisasi sesuai Renstra 2020-2024 nampak seperti grafik 3.13

Grafik 3.13



6.4 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

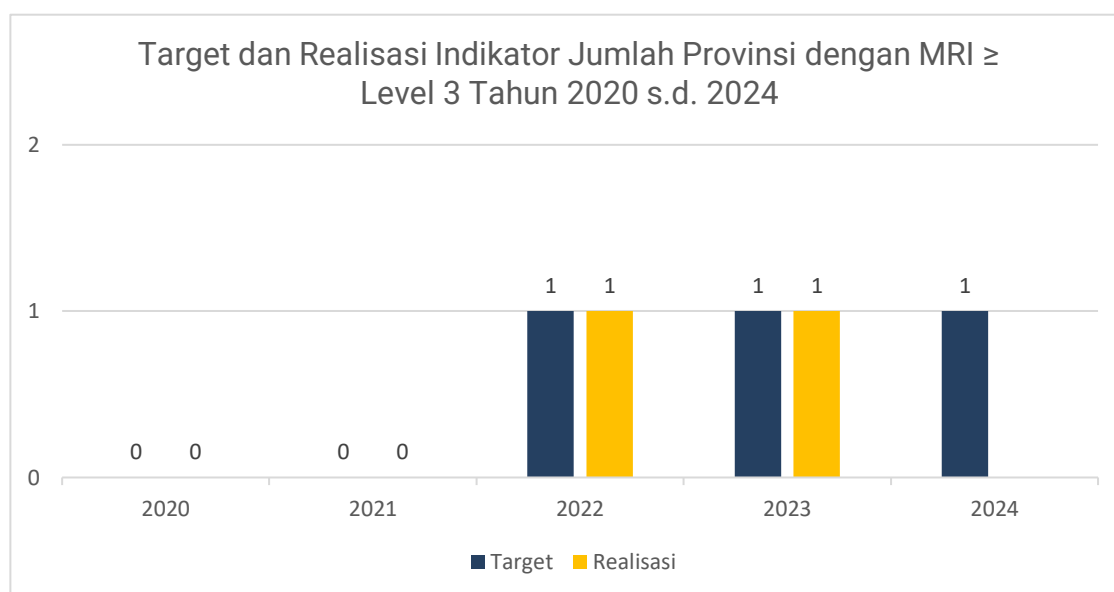
Tercapainya target maturitas SPIP disebabkan oleh kegiatan Bimbingan Teknis terkait dengan SPIP terintegrasi.

Indikator Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 pada tahun 2023 adalah sebesar 100,00% yaitu realisasi 100 persen dari target 6 Kabupaten/Kota.

6.5 Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3

Capaian kinerja indikator Jumlah Pemerintah Daerah dengan MRI \geq Level 3 pada tahun 2023 adalah sebesar 100,00% yaitu realisasi 100 persen dari target 1 Provinsi. Penilaian MRI telah menggunakan standar terbaru sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian /Lembaga/ Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah di wilayah Provinsi Gorontalo seperti terlihat pada grafik 3.14

Grafik 3.14

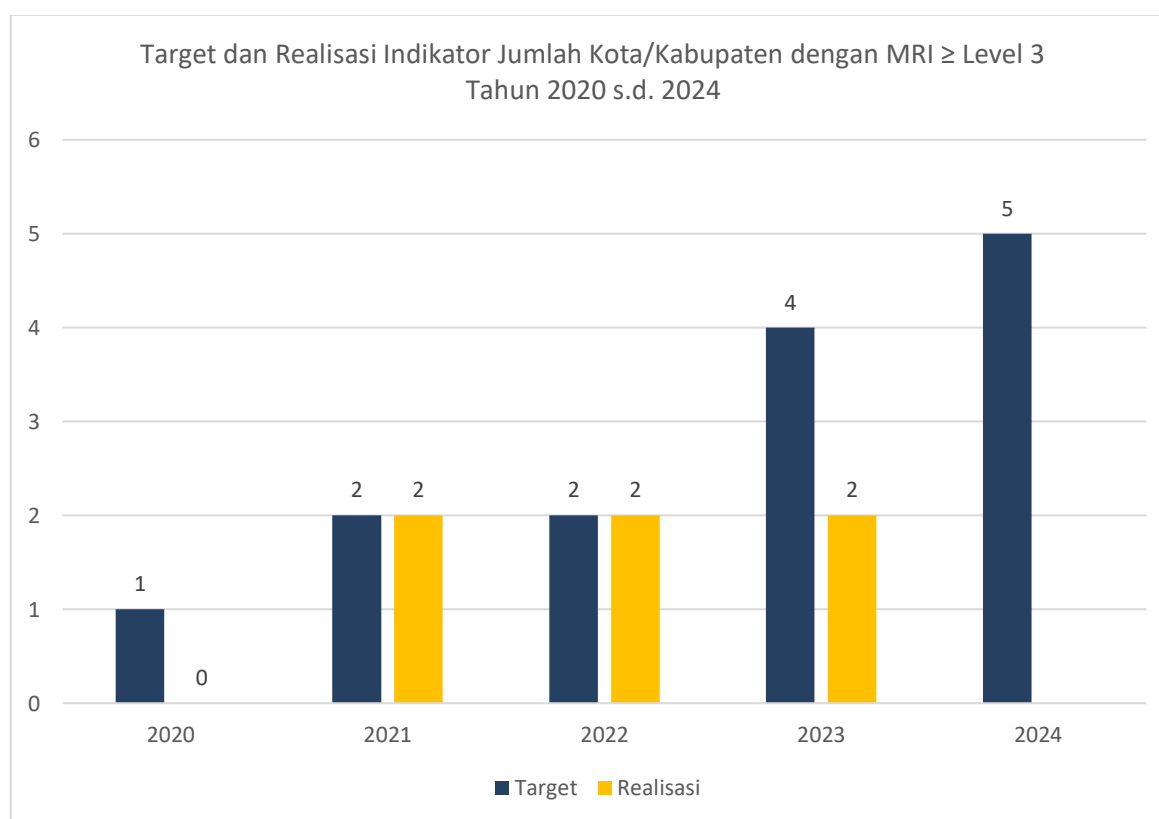


6.6 Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI ≥ Level 3

Capaian kinerja indikator Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Maturitas MRI

≥ Level 3 pada tahun 2023 adalah sebesar 50,00% yaitu realisasi 50 persen dari target 4 Kabupaten/Kota seperti terlihat pada grafik 3.15.

Grafik 3.15

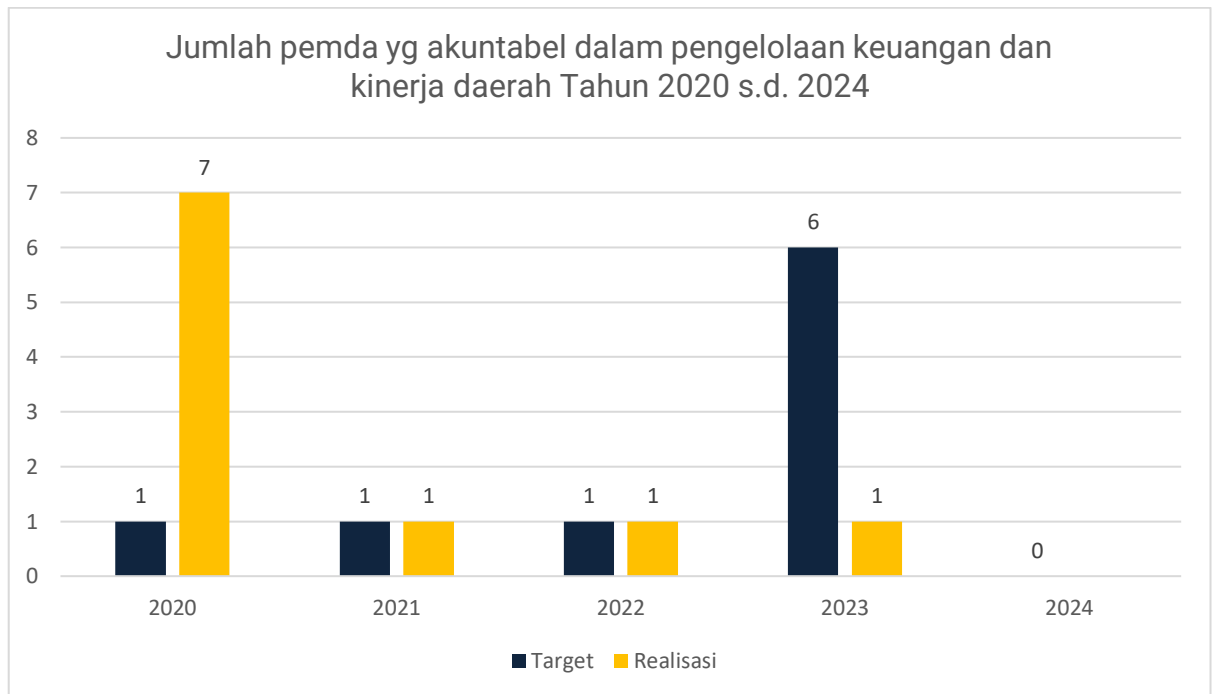


6.7

Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah

Capaian kinerja indikator Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah adalah sebesar 16,67% dari target 6 Pemerintah Daerah atau tercapai 1 Pemerintah Daerah, seperti terlihat pada grafik 3.16

Grafik 3.16



Indikator ini diukur dengan jumlah pemda yang memperoleh opini laporan keuangan WTP sekaligus memiliki nilai SAKIP BB. Kondisi saat ini, seluruh pemda di Provinsi Gorontalo telah memperoleh opini laporan keuangan WTP, namun baru satu pemda yaitu Kabupaten Bone Bolango yang telah memiliki nilai SAKIP BB, sedangkan seluruh pemda lainnya capaian skor SAKIP-nya adalah B.

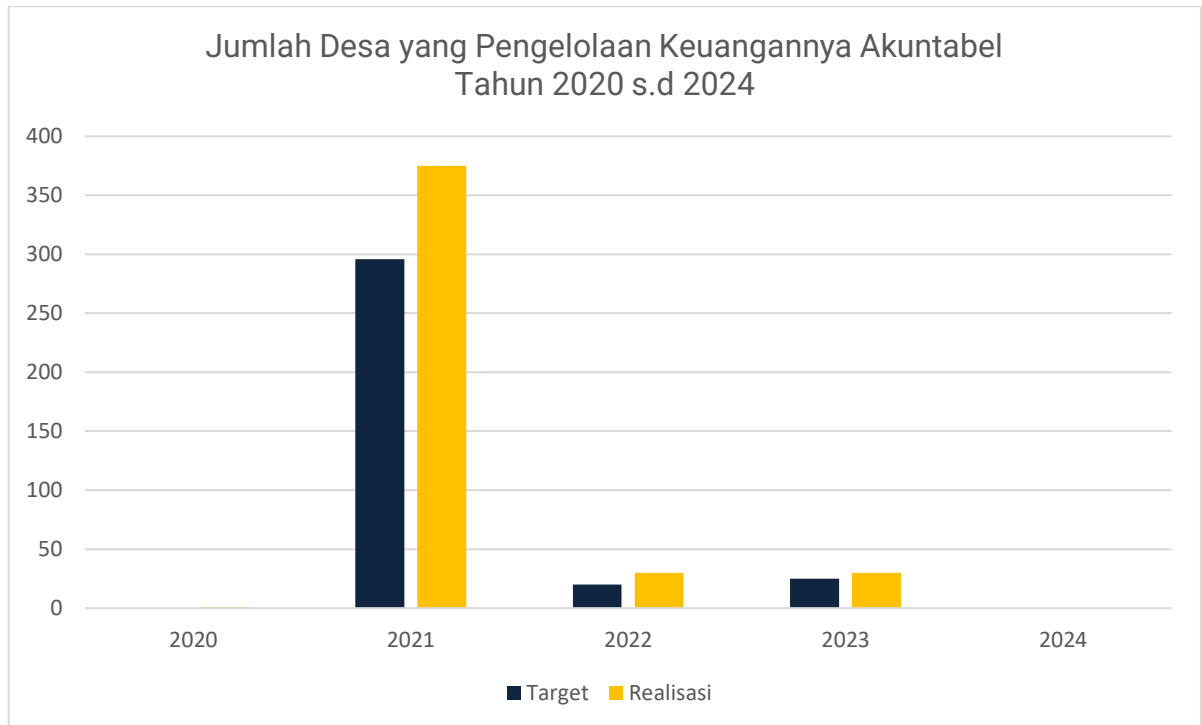
Pengawasan yang telah dilakukan diantaranya berupa bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah dan narasumber terkait SAKIP. Namun demikian, masih diperlukan inovasi dari pemda terkait dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan kinerja serta perbaikan sistem pengukuran kinerja sehingga dapat mendongkrak skor SAKIP

6.8 Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel

Capaian kinerja indikator Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya

Akuntabel adalah sebesar 120% yaitu realisasi 120 persen dari target 25 Desa seperti terlihat pada grafik 3.17

Grafik 3.17



Terdapat perbedaan target pada tahun 2020 yang menggunakan satuan persentase, sementara mulai tahun 2021 menggunakan satuan jumlah unit desa. Sehingga target dan capaian tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun setelahnya.

Capaian target antara lain merupakan hasil pengawasan akuntabilitas keuangan desa, bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa, monitoring dan bimbingan teknis implementasi

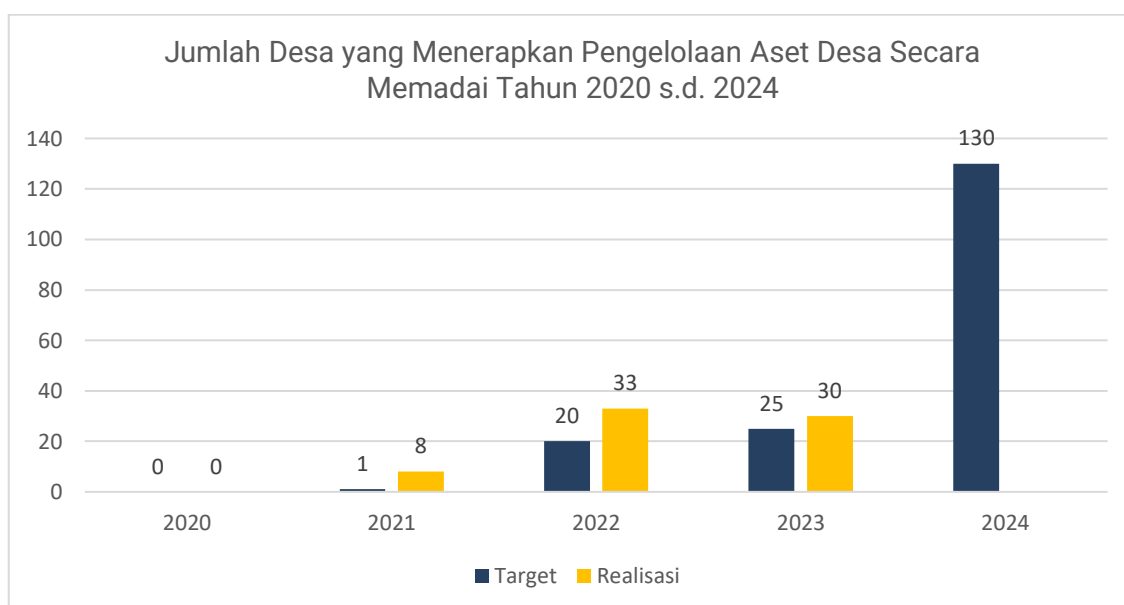
Siskeudes, termasuk implementasi Siskeudes secara online

6.9

Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai

Capaian kinerja indikator Jumlah Desa yang menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara memadai adalah sebesar 120% yaitu realisasi 30 Desa dari target 25 Desa, seperti nampak pada grafik 3.18

Grafik 3.18

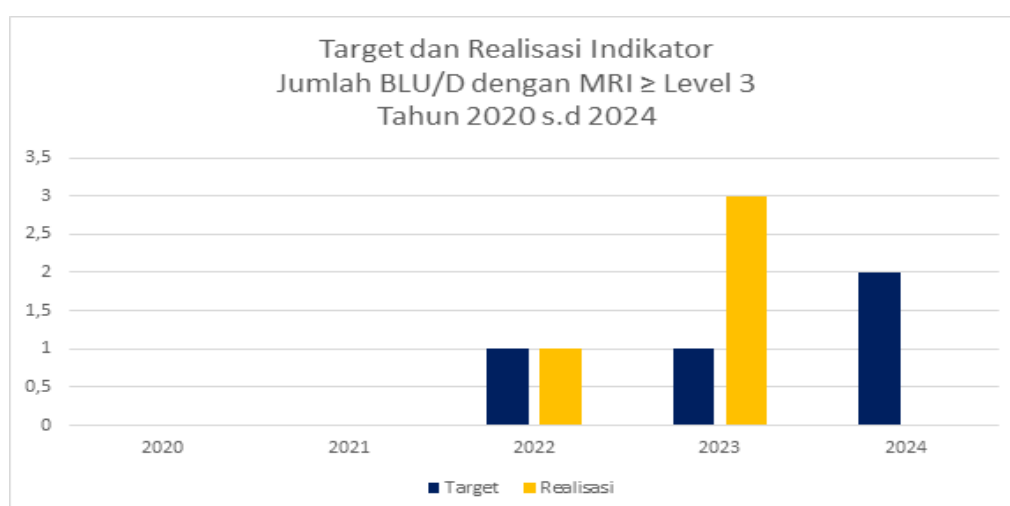


Capaian target antara lain merupakan hasil pengawasan akuntabilitas pengelolaan aset desa dan monitoring tata kelola aset desa yang antara lain merekomendasikan dilaksanakannya inventarisasi aset desa, perbaikan pengelolaan dan pengamanan aset desa serta mendorong implementasi pencatatan aset desa melalui aplikasi Sipades.

6.10

Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3

Capaian kinerja dengan indikator kinerja Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3 pada tahun 2023 adalah sebesar 300,00% yaitu realisasi 3 dari target 1 BLU/D. Target dan realisasi kinerja dengan indikator jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3 pada tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat dalam grafik berikut.



Sasaran Kegiatan

7

Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja

Capaian kinerja Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja tahun 2023 adalah 111,10% dari target.

Rerata capaian sasaran kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja

tahun 2023 adalah 111,10%. Capaian sasaran kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja diukur dengan 7 (tujuh) IKK. Rincian capaian masing-masing IKK disajikan pada tabel 3.13.

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor skala 100	80	78,76	98,45	
7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82	82,60	100,73	
7.3	Persentase Efektifitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70	100,00	142,86	
7.4	Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100	100,00	100,00	
7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	87,11	116,15	
7.6	Skor IKPA Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor skala 100	95	99,26	104,48	
7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80	101,28	126,60	
Rerata capaian					112,75	

Capaian tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,48% dibandingkan capaian tahun 2022, yaitu dari 112,27%

7.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

Capaian kinerja Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja tahun 2023 meraih skor 78,76 dari skala 100 atau 98,45% dari skor 80,00 target.

Capaian kinerja indikator Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja pada tahun 2023 meraih skor 78,76 dari skala 100 atau 98,45% dari target skor 80,00. Capaian 2023 lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 83,43. Capaian tersebut berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah

7.2 Nilai SAKIP Unit Kerja

Capaian kinerja indikator Nilai Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Unit Kerja pada tahun 2023 meraih skor 82,60 dari skala 100 atau 100,73% dari target skor 82,00.

Capaian kinerja indikator Nilai Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Unit Kerja pada tahun 2023 meraih skor 82,60 dari skala 100 atau 100,73% dari target skor 82,00.

pada tahun 2022 menjadi 112,75% pada tahun 2023. Uraian kinerja masing-masing IKK adalah sebagai berikut.

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2023 oleh Inspektorat BPKP dengan Laporan Nomor PE.09/LHP-175/IN/2/2023 tanggal 11 Juli 2023. Terdapat area yang masih perlu perbaikan untuk Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan Publik. Tidak tercapainya target karena belum diimplementasikannya inovasi dari personil yang ada.

Capaian tersebut lebih rendah dari capaian tahun 2022 sebesar 86,55. Tercapainya target didukung dengan adanya tingkat kepatuhan akan pemenuhan parameter yang diperlukan untuk pencapaian nilai SAKIP maksimal. Penurunan nilai SAKIP tahun 2023 disebabkan perubahan parameter penilaian.

7.3 Persentase Efektifitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)

Capaian kinerja Nilai Skor SPIP Unit Kerja tahun 2023 meraih skor 100 dari skala 100 atau 142,86% dari skor 70,00 target.

Capaian kinerja Nilai Skor SPIP Unit Kerja tahun 2023 meraih skor 100 dari skala 100 atau 142,86% dari skor 70,00 target. Capaian tahun 2023 lebih tinggi dari capaian tahun 2022 sebesar 91,30. Capaian ini diperoleh dari persentase jumlah pengendalian yang efektif unit

kerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Jumlah pengendalian efektif sebanyak 3 kegiatan dari jumlah pengendalian yang direncanakan sebanyak 3 kegiatan sehingga skor SPIP sebesar 100.

Hal ini disebabkan adanya kesadaran seluruh personil untuk sadar risiko dan melaksanakan pengendalian yang sudah direncanakan.

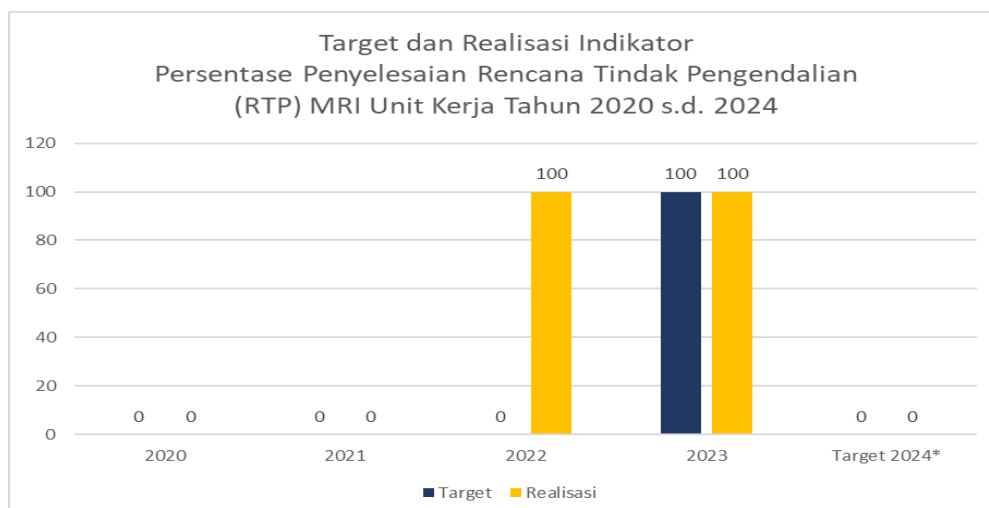
7.4 Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)

Persentase Penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Manajemen Risiko di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2023 adalah sebesar 100,00%

Capaian kinerja indikator Persentase Penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Manajemen Risiko mencerminkan nilai kinerja yang

merupakan perbandingan realisasi Jumlah penyelesaian RTP dengan target Jumlah penyelesaian RTP .

Pada Tahun 2023, Realisasi IKK Persentase Penyelesaian RTP” mencapai 100% dari target sebesar 100%. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2022 sebesar 100%.



*Untuk IKK Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2024 Tidak Terdapat pada RENSTRA Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo 2020-2024

7.5 Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja

Capaian indikator Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja tahun 2023 mendapatkan skor 87,11 atau 116,15% dari target skor 75. Capaian ini menurun dibandingkan capaian tahun 2022

dengan skor 89,52. Capaian ini dihitung berdasarkan survey kepuasan layanan kepada mitra yang pernah mendapatkan layanan dari BPKP.

7.6 Skor IKPA Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)

Capaian kinerja Nilai Skor IKPA Unit Kerja tahun 2023 meraih skor 99,26 dari skala 100 atau 104,48% dari skor 95,00 target.

Capaian kinerja Nilai Skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2023 meraih skor 99,26 dari skala 100 atau 104,48% dari skor 95,00 target. Capaian ini meningkat dari tahun 2022

dengan Skor 98,03. Peningkatan capaian kinerja IKPA tahun 2023 disebabkan meningkatnya kualitas pengelolaan belanja kontraktual dan pengelolaan UP/TUP. Adapun penyebab tidak tercapainya skor IKPA 100 disebabkan kinerja penyerapan anggaran triwulanan tidak mencapai target khususnya pada Triwulan II dan III tahun 2023.

7.7 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja

Capaian kinerja Nilai Skor Pengelolaan BMN Unit Kerja tahun 2023 meraih skor 92,07 dari skala 100 atau 115,09% dari skor 80,00 target.

Capaian kinerja Nilai Skor Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2023 meraih skor 101,28 dari skala 100 atau 126,60% dari target skor 80,00. Capaian ini

meningkat dari tahun 2022 dengan Skor 97,96 atau 122,06%. Peningkatan capaian kinerja pengelolaan BMN tahun 2023 disebabkan penggunaan dan pemanfaatan BMN terkait Surat Izin Penghunian (SIP) atas rumah dinas berupa rumah susun telah dimutakhirkan sesuai penghuni yang masih aktif.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebesar

Rp19.878.256.247,00 atau terserap 99,66% dari anggaran sebesar

Rp 19.945.243.000,00. Realisasi Rp19.699.641.000,00. Rincian anggaran 2023 atau meningkat penggunaan anggaran per jenis belanja dibandingkan dengan anggaran tahun disajikan pada Tabel 3.14. Rincian 2022 sebesar Rp19.537.439.274,00 penggunaan anggaran per kegiatan dengan penyerapan sebesar 99,18% dari disajikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.14

Anggaran dan Realisasi Keuangan per Jenis Belanja Tahun 2023

1	Belanja Pegawai	11.493.451.000,00	11.479.468.829,00	99,88
2	Belanja Barang	7.047.306.000,00	6.995.364.559,00	99,26
3	Belanja Modal	1.404.486.000,00	1.403.422.859,00	99,92
		19.945.243.000,00	19.878.256.247,00	99,66

Tabel 3.15

Anggaran dan Realisasi Keuangan per Kegiatan Tahun 2023

FAG.U11	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	528.067.000	525.734.671	99,56 %
FAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	76.538.000	76.537.444	100,00 %
UAG.U21	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	260.287.000	260.183.804	99,96 %
UAG.U22	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	282.843.000	280.451.514	99,15 %
UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	119.040.000	116.031.332	97,47 %
UAG.U24	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	18.660.000	18.660.000	100,00 %
UAG.U27	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	80.857.000	80.165.038	99,14 %
UAG.U41	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	213.241.000	213.232.820	100,00 %
UAG.U52	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	914.858.000	912.431.515	99,73 %
UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	111.360.000	111.243.018	99,89 %
WA.3676 Pelaksanaan Dukungan Manajemen				

EBA.962	Layanan Umum	528.730.000	528.320.571	99,92 %
EBA.994	Layanan Perkantoran	14.484.292.000	14.431.389.861	99,63 %
EBB.951	Layanan Sarana Internal	220.950.000	220.221.310	99,67 %
EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.183.536.000	1.183.201.549	99,97 %
Jumlah		19.945.243.000	19.878.256.247	99,6641467

Rincian penggunaan anggaran berdasarkan Sasaran Strategis dan Rincian Output disajikan pada Lampiran I dan Lampiran VIII. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja utama tahun 2023 dengan 2022 serta target akhir tahun Renstra disajikan pada Lampiran II. Perbandingan realisasi output kegiatan tahun 2023 dengan 2022 disajikan pada

Lampiran IX. Sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp66.986.753,00 atau 0,34% merupakan efisiensi dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, diantaranya:

- Belanja perjalanan dinas biasa
- Belanja uang makan PNS
- Belanja uang lembur
- Belanja pemeliharaan

C. ANALISIS EFISIENSI

Secara umum, proses kegiatan operasional BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo tahun 2023 telah dilaksanakan secara efisien ditinjau dari penggunaan dana dan SDM. Berdasarkan capaian kinerja *outcome*, rerata capaian efisiensi kegiatan operasional BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah sebesar 141,95% untuk penggunaan dana dan 106,55% untuk penggunaan SDM. Berdasarkan capaian kinerja *output*, rerata capaian efisiensi adalah sebesar 118,67 untuk penggunaan dana dan 89,08% untuk penggunaan SDM. Pengukuran efisiensi yaitu dengan

membandingkan capaian kinerja (*outcome*) dan output yang dihasilkan. Kegiatan operasional disebut efisiensi apabila adanya penurunan atau penghapusan biaya yang tidak perlu.

Berdasarkan capaian kinerja *outcome*, efisiensi penggunaan dana dan SDM tertinggi berada pada sasaran strategis 1 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah yaitu sebesar 271,40%. Efisiensi penggunaan dana pada sasaran strategis ini adalah sebesar 337,78% dan efisiensi

penggunaan SDM sebesar 205,02%. Rerata efisiensi terendah berada pada sastra 5 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi, yaitu sebesar 57,89%. Efisiensi penggunaan dana dan

SDM pada sasaran strategis ini adalah masing-masing sebesar 71,09% dan 44,68%. Rincian hasil penghitungan efisiensi berdasarkan capaian kinerja outcome tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.16

Tabel 3.16
Hasil Perhitungan Efisiensi Berdasarkan Capaian Kinerja Outcome Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Capaian Input (%)		Capaian Outcome (%)	Efisiensi (%)	
		Dana	SDM		Dana	SDM
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	99.60	164.1	336.43	337.78	205.02
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	99.22	139.4	108.82	109.68	78.06
3	Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintah pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	99.14	100	125	126.08	125.00
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	99.94	100	124	124.07	124.00
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	99.99	159.1	71.08	71.09	44.68
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU	99.64	209.7	110.67	111.07	52.78
7	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat	99.67	100	110.1	110.46	110.10
Rata-rata Efisiensi		99.75	132.77	141.47	141.82	106.55

Berdasarkan capaian kinerja output, efisiensi tertinggi terdapat pada sasaran strategis 5 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi sebesar 162,86%. Hal ini terjadi karena terdapat realisasi output sebesar 200%, sementara realisasi anggaran sebesar 99,99% sehingga efisiensi sebesar 200,02% serta realisasi penggunaan SDM 159,1% sehingga

efisiensi sebesar 125,71%. Rerata efisiensi terendah berada pada sasaran strategis 1 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan daerah yaitu sebesar 90,16%. Rincian hasil penghitungan efisiensi berdasarkan capaian kinerja *output* tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17

Hasil Perhitungan Efisiensi (Output) Per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Capaian Input (%)		Capaian Output (%)	Efisiensi (%)	
		Dana	SDM		Dana	SDM
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	99.60	164.1	111.76	112.21	68.10
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	99.22	139.4	109.09	109.95	78.26
3	Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintah pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	99.14	100	100	100.87	100.00
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	99.94	100	100	100.06	100.00
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	99.99	159.1	200	200.02	125.71
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU	99.64	209.7	160	160.58	76.30
7	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat	99.67	100	115.38	115.76	115.38
Rata-rata Efisiensi		99.75	132.77	118.27	118.57	89.08

Pada tahun 2023, rerata capaian output SDM adalah 132,77% (realisasi 12.640 dari target 9.520) dan rerata capaian realisasi anggaran sebesar 99,66% (realisasi Rp19.878.256.247 dari target Rp19.945.243.000). Sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar

Rp66.986.753,00 atau 0,34% merupakan efisiensi dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, antara lain belanja perjalanan dinas biasa, belanja uang makan PNS, belanja uang lembur dan belanja pemeliharaan.

D. KINERJA LAINNYA

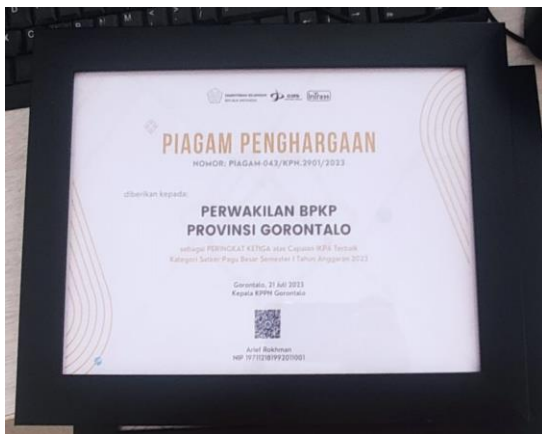
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2023 telah melaksanakan inovasi yang dapat dikategorikan ke dalam kinerja lain yaitu penyimpanan dokumen penugasan dalam *cloud* sehingga bisa diakses secara *online*. Sebagai salah satu bentuk pengakuan atas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Gorontalo, berbagai penghargaan telah diperoleh sepanjang tahun 2023, yaitu:

1. Penghargaan Predikat Informatif dari komisi informasi Provinsi Gorontalo dari hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2023 Kominfotik award 2023 Provinsi Gorontalo.



2. Penghargaan PERINGKAT KETIGA atas Capaian IKPA Terbaik Kategori Satker Pagu Besar Semester I Tahun 2023



3. Penghargaan PERINGKAT PERTAMA satuan kerja dengan Implementasi Digipay BRI Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2023



4. Penghargaan PERINGKAT KEDUA satuan kerja dengan implementasi KKP BRI Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2023



5. Penghargaan Peringkat Ketiga untuk Satker dengan Pagu dengan Kinerja Anggaran sebesar 99,26 dari Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2023.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dalam mencapai sasaran program dan IKU tahun 2023, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Dari uraian capaian kinerja pada Bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa atas 32 IKU/IKK yang dimiliki oleh Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo seluruhnya tercapai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Capaian Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	IKK	Capaian IKK (%)	Ket
1	Sasaran Kegiatan 1	IKK 1.1	83,33%	Tercapai
		IKK 1.2	396,99%	Tercapai
		IKK 1.3	81,39%	Tidak Tercapai
2	Sasaran Kegiatan 2	IKK 2.1	117,65%	Tercapai
		IKK 2.2	100,00%	Tercapai
3	Sasaran Kegiatan 3	IKK 3.1	125,00%	Tercapai
4	Sasaran Kegiatan 4	IKK 4.1	150,00%	Tercapai
		IKK 4.2	150,00%	Tercapai
		IKK 4.3	97,50%	Tidak Tercapai
		IKK 4.4	100,00%	Tercapai
5	Sasaran Kegiatan 5	IKK 5.1	100,00%	Tercapai
		IKK 5.2	117,65%	Tercapai
		IKK 5.3	66,67%	Tidak Tercapai
		IKK 5.4	0,00%	Tidak Tercapai

No	Sasaran Strategis	IKK	Capaian IKK (%)	Ket
6	Sasaran Kegiatan 6	IKK 6.1	100,00%	Tercapai
		IKK 6.2	100,00%	Tercapai
		IKK 6.3	100,00%	Tercapai
		IKK 6.4	100,00%	Tercapai
		IKK 6.5	100,00%	Tercapai
		IKK 6.6	50,00%	Tidak Tercapai
		IKK 6.7	16,67%	Tidak Tercapai
		IKK 6.8	120,00%	Tercapai
		IKK 6.9	120,00%	Tercapai
		IKK 6.10	300,00%	Tercapai
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	IKK 7.1	98,45%	Tidak Tercapai
		IKK 7.2	100,73%	Tercapai
		IKK 7.3	142,86%	Tercapai
		IKK 7.4	100,00%	Tercapai
		IKK 7.5	116,15%	Tercapai
		IKK 7.6	104,48%	Tercapai
		IKK 7.7	126,60%	Tercapai

Keberhasilan pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo karena faktor-faktor yang kondusif yaitu komitmen dan sinergi seluruh pihak, dukungan sumber daya yang memadai serta *monitoring* berkelanjutan.

Disadari sepenuhnya bahwa pencapaian sasaran strategis memerlukan upaya dan kerja keras yang berkesinambungan. Langkah-langkah yang direncanakan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yaitu melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Daerah untuk percepatan internalisasi penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko secara komprehensif dalam kegiatan seluruh instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi.

**KINERJA SASARAN STRATEGIS DAN PENGGUNAAN DANA/SDM (OH) TAHUN 2023
PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO**

No	Sasaran Kegiatan	IKK		Kinerja Tahun 2023				Keuangan			SDM (OH)		
				Satuan	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1.1	Nilai potensi penerimaan negara/daerah yang terealisasi	Rp (Juta)	2643,67	3036,32	114,85%	323.098.767	323.098.767	100,00%	445	445	100,00%
		1.2	Nilai pengeluaran negara/daerah yang efisien	Rp (Juta)	1640225,5	770762,76	46,99%	434.905.078	434.905.078	100,00%	102	102	100,00%
		1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara	Rp (Juta)	42492,57	34.555,18	81,32%	325.436.676	325.436.676	100,00%	304	304	100,00%
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	2.1	Presentase Hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85	100	117,65%	785.975.934	785.975.934	100,00%	24	24	100,00%
		2.2	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang diawasi	Topik APPD	1	2	200,00%	546.768.598	546.768.598	100,00%	33	33	100,00%
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	3.1	Presentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen	80	100	125,00%	34.656.789	34.656.789	100,00%	354	354	100,00%
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	4.1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	2	3	150,00%	74.477.899	74.477.899	100,00%	656	656	100,00%
		4.2	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	2	3	150,00%	42.567.883	42.567.883	100,00%	76	76	100,00%
		4.3	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	40	39	97,50%	34.565.789	34.565.789	100,00%	76	76	100,00%
		4.4	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	7	7	100,00%	5.645.353	5.645.353	100,00%	567	567	100,00%
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100	100	100,00%	67.687.999	67.687.999	100,00%	765	765	100,00%
		5.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	85	100	117,65%	23.467.798	23.467.798	100,00%	477	477	100,00%
		5.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	3	2	66,67%	43.985.286	43.985.286	100,00%	46	46	100,00%
		5.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	2	0	0,00%	56.778.900	56.778.900	100,00%	87	87	100,00%
		6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Prov	1	1	100,00%	32.524.666	32.524.666	100,00%	788	788	100,00%
		6.2	Jumlah APIP Kab/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/Kota	6	6	100,00%	456.856.959	456.856.959	100,00%	356	356	100,00%
		6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Prov	1	1	100,00%	43.635.666	43.635.666	100,00%	653	653	100,00%

No	Sasaran Kegiatan	IKK		Kinerja Tahun 2023				Keuangan			SDM (OH)		
				Satuan	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6.4	Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	6	6	100,00%	34.634.674	34.634.674	100,00%	364	364	100,00%
		6.5	Jumlah Provinsi Dengan MRI \geq Level 3	Prov	1	1	100,00%	42.643.643	42.643.643	100,00%	346	346	100,00%
		6.6	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	4	2	50,00%	43.643.667	43.643.667	100,00%	567	4.356	768,25%
		6.7	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	6	1	16,67%	3.422.534	3.422.534	100,00%	544	1.234	226,84%
		6.8	Jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25	30	120,00%	23.536.666	23.536.666	100,00%	396	1.000	252,53%
		6.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25	30	120,00%	35.653.778	23.041.734	64,63%	5.454	5.500	100,84%
		6.10	Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3	BLU/D	1	3	300,00%	11.163.998	11.163.998	100,00%	200	497	248,50%
		Sub Pengawasan						3.527.735.000	3.515.122.956	99,64%	13.680	19.106	139,66%
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor skala 100	80	78,76	98,45%	474.634.000	474.634.000	100,00%	324	324	100,00%
		7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor skala 100	82	82,6	100,73%	8.783.971.620	8.783.971.620	100,00%	1321	1321	100,00%
		7.3	Presentase Efektifitas pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70	100	142,86%	54.096.000	54.096.000	100,00%	324	324	100,00%
		7.4	Presenyase penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100	100	100,00%	8.783.971.620	8.783.971.620	100,00%	23	23	100,00%
		7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	87,11	116,15%	220.950.000	220.221.310	99,67%	54	54	100,00%
		7.6	Skor IKPA Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor skala 100	95	99,26	104,48%	11.493.451.000	11.493.451.000	100,00%	67	67	100,00%
		7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80	101,28	126,60%	2.990.841.000	2.951.921.032	98,70%	767	767	100,00%
		Sub Jumlah Dukungan Pengawasan						16.417.508.000	16.381.133.291	99,78%	2.880	2.880	100,00%
		Jumlah						19.945.243.000	19.896.256.247	99,75%	16.560	21.986	132,77%

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Kegiatan		Kinerja IKK								Target 2024	% realisasi 2023 dari tahun 2024		
			Satuan	2023		2022		2021		2020				
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi			%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	6,2	Jumlah APIP Kab/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	APIP	6	100,00%	6	120,00%	6	100,00%	6	100,00%	6	100,00%	
	6,3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Provinsi	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	
	6,4	Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	6	100,00%	5	83,33%	5	83,33%	6	100,00%	7	100,00%	
	6,5	Jumlah Provinsi Dengan MRI \geq Level 3	Provinsi	1	100%	1	100%	0	-	0	-	1	100%	
	6,6	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	2	50,00%	2	100%	2	100,00%	0	0,00%	5	40%	
	6,7	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	1	16,67%	1	100%	1	100%	7	700%	n/a	n/a	
	6,8	Jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	desa	30	120%	30	150%	375	127%		40,03%	n/a	n/a	
	6,9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	desa	30	150%	33	165%	8	800%	0	0	130	23%	
	6,10	Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3	BLU/D	3	300,00%	1	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	2	150%	
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor skala 100	78,76	98,45%	83,43	104%	86,86	115,81	82,07	100	79	99,70%
		7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor skala 100	82,6	100,73%	98,03	103%	84,13	105,16	84,04	100	84	98,33%
		7.3	Presentase Efektifitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	100	142,86%	97,76	122%	85	130,77	n/a	100	n/a	n/a
		7.4	Presentase penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100	100,00%	86,55	106%	100	100	n/a	100	n/a	n/a
		7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	87,11	116,15%	100	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	81	107,54%
		7.6	Skor IKPA Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor skala 100	99,26	104,48%	91,3	130%	96,42	101,49	97,3	100	90	110,29%
		7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	101,28	115,09	89,52	119,36	87,12	108,9	85	100	n/a	n/a

Rincian Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) beserta tingkat kesehatan/kinerja

No	Nama Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah	Tingkat Kesehatan/kinerja			SPIP		Manajemen Risiko			Kapabilitas SPI		
		Skor	Huruf	Predikat	Skor	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	RSUD Prof. Dr Aloei Saboe	73,5	BB	Baik	-	-	3,13	3	Terdefinisi	-	-	-
2	RSUD Dr Hasri Ainun Habibie	74,4	BB	Baik	-	-	3,1	3	Terdefinisi	-	-	-
3	RSUD Toto Kabila	77	BB	Baik	-	-	3,005	3	Terdefinisi	1.525	1	Initial

Rincian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) beserta tingkat kesehatan/kinerja dan predikatnya

No	Nama Badan Usaha Milik Daerah	Tingkat Kesehatan/kinerja			Manajemen Risiko			Kapabilitas SPI		
		Skor	Huruf	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
1	PDAM Tirta Moolango	2,34	-	Kurang Sehat	-	-	-	-	-	-
2	PDAM Tirta Limutu	2,84	-	Sehat	-	-	-	-	-	-
3	PDAM Tirta Gerbang Emas Gorut	1,98	-	Sakit	-	-	-	-	-	-
4	PDAM Tirta Boalemo	2,83	-	Sehat	-	-	-	-	-	-
5	PDAM Tirta Bolango	1,75	-	Sakit	-	-	-	-	-	-
6	PDAM Muara Tirta Kota	2,97	-	Sehat	-	-	-	-	-	-

Rincian Kualitas Tata Kelola Pemda Provinsi

No	Nama Provinsi	SPIP			Kapabilitas APIP			MR			IEPK		
		Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gorontalo	3.415	3	Terdefinisi	3,060	3	Terdefinisi	3.247	3	Terdefinisi	2.814	2	Belajar

Rincian Kualitas Tata Kelola Pemda Kabupaten/Kota

No	Nama Provinsi	SPIP			Kapabilitas APiP			MR			IEPK		
		Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat	Skor	Level	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gorontalo												
1	Kota Gorontalo	3.085	3	Terdefinisi	03:06	3	Terdefinisi	3.000	3	Terdefinisi	2.598	2	Belajar
2	Kabupaten Boalemo	3.010	3	Terdefinisi	03:00	3	Terdefinisi	2.673	2	Berkembang	3.072	3	Bekerja
3	Kabupaten Bone Bolango	3.031	3	Terdefinisi	03:03	3	Terdefinisi	3.000	3	Terdefinisi	2.600	2	Belajar
4	Kabupaten Gorontalo	3.044	3	Terdefinisi	03:03	3	Terdefinisi	2.800	2	Berkembang	2.530	2	Bekerja
5	Kabupaten Gorontalo Utara	3.026	3	Terdefinisi	03:00	3	Terdefinisi	2.881	2	Berkembang	1.096	1	Buruk
6	Kabupaten Pohuwato	3.116	3	Terdefinisi	03:06	3	Terdefinisi	2.450	2	Berkembang	3.071	3	Bekerja